



UNIVERSITAS INDONESIA

***BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS PADA
BELANJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2009***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**GALATA CONDA PRIHASTANTO
0906654891**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

***BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS PADA
BELANJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2009***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**GALATA CONDA PRIHASTANTO
0906654891**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 11 Juli 2011



(Galata Conda Prihastanto)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Galata Conda Prihastanto

NPM : 0906654891

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

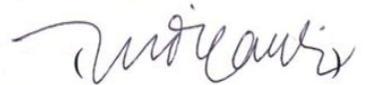
Nama : Galata Conda Prihastanto
NPM : 0906654891
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : *Benefit Incidence Analysis* Pada Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis
Anggota Penguji : Widyanti Soetjipto, S.E., M.Soc.Sc.
Pembimbing : Ir. Hania Rahma, M.Si.

()



()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Benefit Incidence Analysis* Pada Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2009”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE UI).

Dalam kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan ini :

1. Ibu Hania Rahma yang telah berkenan membimbing saya dari mulai proses penulisan proposal sampai tesis. Terima kasih atas waktu dan pengetahuan ibu yang telah dibagi kepada saya sehingga saya dapat mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara berpikir ilmiah.
2. Bapak Imam Rozani yang telah berkenan menjadi moderator seminar tesis saya. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan waktu seminar tesis saya.
3. Bapak Andi Fahmi Lubis sebagai Ketua Penguji dan Ibu Widyanti Soetjipto sebagai Anggota Penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan tesis ini dan dorongan kepada penulis untuk lebih mendalami teori yang didapat selama kuliah.
4. Bapak Arindra Artasya Zainal sebagai Ketua Program MPKP FE UI atas interaksi dan dukungannya selama saya menjadi mahasiswa MPKP FE UI.
5. Para dosen, staf, satpam dan karyawan MPKP khususnya Mbak Siti dan Mbak Warni atas dukungannya sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan bersemangat selama kuliah di MPKP.
6. Pak Franky, Pak Denny, dan Mas Tono atas dukungannya sehingga penulis dapat membayar uang kuliah selama ini.
7. Bapak Bagus Konstituante beserta staf di Ditjen Perbendaharaan dan Bapak Sunardi beserta staf di Dinas Pendidikan Klaten atas bantuan kepada penulis untuk akses data.

8. Teman-teman yang menjadi teman belajar selama ini : dik vera, mbak rini, mbak reni, ira, ninda, laily, pak nandar, pak hamdan, fajar dan juga teman-teman senior dan junior yang selama ini berinteraksi dengan hangat baik di ruang kuliah maupun di ruang 1.4.
9. Keluarga dan keponakan-keponakanku yang selalu mendukung dan memberikan suasana segar dalam hidup ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna. Penulis berharap masukan dan kritik dari para pembaca sebagai tambahan pengetahuan penulis untuk ke depannya. Semoga tesis ini berharap bagi para pembaca khususnya pemegang kebijakan belanja pendidikan di pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemkab Klaten.

Jakarta, 11 Juli 2011

Penulis

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galata Conda Prihastanto
NPM : 0906654891
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

BENEFIT INCIDENDE ANALYSIS PADA BELANJA PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan



(Galata Conda Prihastanto)

ABSTRAK

Nama : Galata Conda Prihastanto
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : *Benefit Incidence Analysis* Pada Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan *Benefit Incidence Analysis*. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.

Kata Kunci : Belanja pendidikan, kelompok pendapatan, dan *benefit incidence analysis*

ABSTRACT

Name : Galata Conda Prihastanto
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : *Benefit Incidence Analysis of Education Spending in Klaten Regency 2009*

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using *Benefit Incidence Analysis*. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by middle and upper income group.

Key Words : Education Spending, income group, and *benefit incidence analysis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK/ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
2. KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS.....	10
2.1. Belanja Publik	10
2.2. Pendidikan sebagai <i>publicly provided public good</i>	11
2.3. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia	13
2.4. Penelitian sebelumnya	17
2.5. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah.....	20
3. METODE PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian.....	22
3.2. Jenis dan Sumber Data	23
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian.....	24
3.4. <i>Benefit Incidence Analysis</i>	24
4. ANALISIS DISTRIBUSI MANFAAT BELANJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN	30
4.1. Belanja Pendidikan per Murid	30
4.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan.....	36
4.2.1. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SD Negeri.....	40
4.2.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SMP Negeri.....	43
4.2.3. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SMA/SMK Negeri	47
4.2.4. Distribusi Manfaat Total Belanja Pendidikan	50
4.3. Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan.....	51
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Periode Tahun Anggaran (TA) 2001-2009.....	3
Tabel 2.1. Ringkasan Pengaturan Pembiayaan Pendidikan Antar Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.....	15
Tabel 4.1. Komposisi Realisasi Belanja Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	34
Tabel 4.2. Belanja Pendidikan Rata-rata per Murid SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	35
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Klaten Berdasarkan Susenas Tahun 2009	37
Tabel 4.4. Profil Kuantil Menurut Tingkat Pendapatan Rumah Tangga yang Memiliki ART Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	38
Tabel 4.5. Persentase Anggota Rumah Tangga Usia Sekolah tiap Kelompok Pendapatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2009	39
Tabel 4.6. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SD Negeri menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	40
Tabel 4.7. Distribusi Dana BOS SD Negeri menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	42
Tabel 4.8. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SMP Negeri Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	44
Tabel 4.9. Distribusi Dana BOS SMP Negeri Menurut Kelompok Pendapatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	45
Tabel 4.10. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SMA/SMK Negeri Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009....	47
Tabel 4.11. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	50
Tabel 4.12. Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SD Negeri terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	52

Tabel 4.13. Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SMP Negeri terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009	53
Tabel 4.14. Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SMA/SMK Negeri terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009	54
Tabel 4.15. Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Arus Dana dalam Belanja Pendidikan	17
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	20



DAFTAR RUMUS

3.1. Rumus Matematika <i>Benefit Incidence Analysis</i>	28
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Klaten TA 2009
- Lampiran 2 Alokasi Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas TA 2009
- Lampiran 3 Belanja Kemendiknas di Provinsi Jawa Tengah TA 2009
- Lampiran 4 Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten TA 2009





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga negara harus memberikan layanan pendidikan bagi rakyatnya. Untuk itu para pendiri bangsa menetapkan salah satu tujuan negara Indonesia didirikan yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tujuan negara Indonesia didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ditegaskan lagi dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28C ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan ayat 2 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Warga negara juga mempunyai hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran dalam rangka memajukan dirinya. Hak warga negara untuk memilih pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut diamanatkan juga oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan ayat 2 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada 8 Juli 2003 sebagai tindak lanjut dari amanat UUD di atas. UU ini menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bagi warga negara yang mempunyai kelainan mental, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial, UU ini memberikan jaminan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan khusus dari negara. UU ini juga menjamin hak memperoleh layanan pendidikan khusus bagi warga negara yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang dan masyarakat adat yang terpencil, mengingat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dan ribuan masyarakat adat yang tinggal di berbagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian hak warga negara untuk memperoleh pendidikan harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Untuk memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah harus dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, etnis, golongan ekonomi dan sosial, dan gender. Kewajiban tersebut secara spesifik ditegaskan oleh UU ini bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah harus memberikan alokasi anggarannya untuk pendidikan dalam jumlah yang signifikan untuk melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan khususnya pendidikan dasar bagi warga negara yang berusia 7–15 tahun. Dasar hukum pembiayaan dan besarnya alokasi pendidikan yang harus disediakan oleh pemerintah ditetapkan pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yakni “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pemerintah Pusat dan Pemda mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20% dari

anggarnya untuk bidang pendidikan supaya kewajiban pemerintah memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan dapat terwujud.

Berdasarkan amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan maka pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor pendidikan. Perhatian pemerintah ini ditunjukkan dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBN Periode Tahun Anggaran (TA) 2001-2009

Tahun	Anggaran Pendidikan (Rp miliar)	Persentase Anggaran Pendidikan terhadap APBN
2001	13.945	4,42
2002	19.512,93	5,87
2003	20.435,80	5,98
2004	21.628,80	6,18
2005	33.397,60	6,18
2006	44.109,50	10,10
2007	53.067,10	10,50
2008	158.520,10	18,50
2009	207.413,50	20,00

Sumber : APBN TA 2001-2009 dalam Utami, (2010)

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan bahwa realisasi kewajiban dua puluh persen dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk belanja pendidikan yang diamanatkan UUD 1945 baru dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2009. Kebijakan pemerintah ini juga didorong oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI/2008 bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20

persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebelum tahun 2001 belanja pendidikan merupakan urusan Pemerintah Pusat karena Indonesia menganut sistem sentralistik dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam urusan pendidikan. Semua belanja pendidikan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan kegiatannya di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai 1 Januari 2001 maka pemerintahan mulai menerapkan sistem desentralisasi termasuk dalam urusan belanja pendidikan sejak tanggal tersebut.

Sejak itu Pemda wajib melaksanakan bidang pendidikan, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 pasal 11 ayat 2 “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban Pemda dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan desentralisasi sebagian belanja pendidikan kepada Pemda. Terkait belanja pendidikan di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) juga menanggung sebagian pendanaan untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan di daerahnya seperti ditegaskan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999.

1.2. Perumusan Masalah

Pemda memegang peranan kunci dalam penyelenggaraan pendidikan pada era desentralisasi ini. Keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan setiap Pemda dalam mengelola sektor pendidikan di daerah masing-masing. Pada tahun 2006, belanja pendidikan

Pemda/Pemkot berkisar 51 persen dari total belanja pendidikan nasional, sedangkan belanja pendidikan Pemprov hanya 5% dan sisanya merupakan belanja pendidikan Pemerintah Pusat (*World Bank*, 2008). Belanja pendidikan nasional yang didominasi oleh belanja pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian lebih kepada sektor pendidikan.

Pemkab Klaten memberikan perhatian khusus kepada sektor pendidikan. Perhatian tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase belanja pendidikan terhadap total belanja Pemkab Klaten. Nilai belanja Pemkab Klaten untuk Dinas Pendidikan pada tahun 2008 sebesar Rp 530.650.107.672,00, sedangkan total belanja Pemkab Klaten pada tahun tersebut sebanyak Rp 1.000.134.799.035,00. 53% dari belanja Pemkab Klaten tahun 2008 hanya untuk sektor pendidikan padahal masih banyak dinas lainnya di Pemkab Klaten, seperti dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. Mayoritas belanja Pemkab Klaten tahun 2009 juga teralokasikan pada belanja Dinas Pendidikan. Belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp 528.070.652.317,00 atau 53,8% dari total belanja Pemkab Klaten tahun 2009 yakni Rp 981.121.677.296,00 seperti yang tercatat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 (lihat Lampiran 1).

Jumlah belanja pendidikan di atas hanya berasal dari dana APBD Kabupaten Klaten. Selain dari APBD Kabupaten Klaten, sumber dana belanja pendidikan tersebut berasal juga dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Semua dana tersebut tercatat dalam realiasi pendapatan dan belanja dalam APBD Kabupaten Klaten. Pada era desentralisasi ini belanja pendidikan di kabupaten/kota termasuk Kabupaten Klaten ada juga yang berasal dari APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan khususnya dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Belanja pendidikan yang sumber dananya dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak masuk dalam APBD Kabupaten Klaten tetapi dananya langsung masuk rekening penerima manfaat belanja, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung oleh sekolah-sekolah. BOS merupakan salah satu dana dekonsentrasi dari Kemendiknas yang rutin diterima oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Klaten sejak 2005.

Besarnya belanja pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Klaten untuk mendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mencapai visinya, yakni terwujudnya masyarakat Klaten yang sehat, cerdas, produktif, berbudaya dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mempunyai beberapa misi, sebagai berikut (Dinas Pendidikan, 2009) :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
2. Memberdayakan tenaga pendidikan dan kependidikan.
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Meningkatkan kualitas tamatan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan minat siswa untuk mencintai kebudayaan daerah.

Berdasarkan visi dan misi di atas khususnya misi pertama, Dinas Pendidikan mempunyai sasaran pengembangan pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah (SMA/SMK). Salah satu tujuan pengembangan pendidikan formal, yakni agar setiap penduduk Kabupaten Klaten yang berusia sekolah khususnya umur 7–15 tahun dapat menikmati semua jenjang pendidikan dasar, yakni SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mengukur keberhasilan Pemkab Klaten memberikan layanan pendidikan dasar kepada penduduknya yang berusia 7–15 tahun, salah satu indikatornya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten. APM merupakan proporsi jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan (BPS, 2010), salah satu contohnya, APM SD Kabupaten Klaten adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk yang berusia 7-12 tahun di Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten terjadi penurunan APM dalam tingkat pendidikan dasar, yakni APM SD lebih tinggi daripada APM SMP pada tahun 2009. APM SD mencapai 105,31 sedangkan APM SMP hanya 93,55 (Dinas Pendidikan, 2009).

APM SD di Kabupaten Klaten yang sebesar 105,31 menunjukkan bahwa ada murid SD di Kabupaten Klaten yang berusia 7–12 tahun berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten. APM SD Kabupaten Klaten yang lebih dari 100 belum dapat diartikan bahwa semua penduduk Kabupaten Klaten usia 7-12 bersekolah di SD atau sekolah lain yang sederajat di Kabupaten Klaten pada tahun 2009. Ada kemungkinan penduduk Kabupaten Klaten usia 7-12 tahun bersekolah SD di luar wilayah Kabupaten Klaten sehingga persentase penduduk usia 7-12 tahun dari luar Kabupaten Klaten yang bersekolah di SD atau sekolah lain yang sederajat lebih besar daripada 5,31% dari total murid SD atau sekolah lain yang sederajat usia 7-12 tahun di Kabupaten Klaten pada tahun 2009. APM SMP di Kabupaten Klaten sebesar 93,55 menunjukkan bahwa kemungkinan ada penduduk Kabupaten Klaten usia 13-15 tahun tidak dapat bersekolah di SMP atau sekolah lain yang sederajat. APM SMA/SMK di Kabupaten Klaten adalah 55,58 pada tahun 2009. APM SMA/SMK yang lebih rendah daripada APM SMP menunjukkan bahwa kemungkinan ada penduduk Kabupaten Klaten usia 16-18 tahun tidak bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK atau sekolah lain yang sederajat lebih besar daripada kemungkinan penduduk Kabupaten Klaten usia 13-15 tahun yang tidak dapat bersekolah di SMP atau sekolah lain yang sederajat.

APM yang menurun dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah mengindikasikan adanya kemungkinan sebagian penduduk Kabupaten Klaten yang berusia sekolah tidak menikmati belanja pendidikan karena mereka tidak bersekolah pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya. Lalu muncul pertanyaan kelompok masyarakat mana yang tidak dapat menikmati belanja pendidikan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi *benefit incidence* dibutuhkan untuk mengetahui distribusi manfaat belanja pendidikan pada tiap kelompok masyarakat. *Benefit incidence analysis* (BIA) dapat membantu pemerintah mengevaluasi efisiensi dan keadilan dari program pendidikan yang dibiayai dengan anggarannya. Untuk itu penelitian ini mengarah pada jawaban atas tiga pertanyaan, sebagai berikut :

1. Berapa besar belanja pendidikan per murid pada setiap tingkat pendidikan di Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana distribusi belanja pendidikan di Kabupaten Klaten terhadap setiap kelompok masyarakat berdasarkan segmentasi pendapatannya?
3. Berapa besar manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten yang diterima kelompok masyarakat termiskin?

1.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini hanya pada realisasi belanja pendidikan yang sumber dananya dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kemendiknas dalam APBN dan belanja Dinas Pendidikan dalam APBD Kabupaten Klaten untuk urusan Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung belanja pendidikan per murid pada setiap tingkat pendidikan di Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis distribusi belanja pendidikan untuk setiap kelompok masyarakat berdasarkan segmentasi pendapatannya di Kabupaten Klaten.
3. Menganalisis manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten yang dinikmati kelompok masyarakat termiskin.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan kepada Kemendiknas dan Pemkab Klaten untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan belanja pendidikan sehingga kelompok masyarakat termiskin lebih banyak menikmati manfaat dari belanja tersebut.
2. Sebagai masukan kepada DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten yang memutuskan APBN dan APBD bersama Pemerintah Pusat dan Pemkab Klaten supaya belanja pendidikan lebih diarahkan pada program yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat termiskin.

3. Masyarakat Klaten dapat mengetahui apakah belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 sudah tepat sasaran, yakni kelompok masyarakat termiskin menerima sebagian besar manfaatnya.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS

2.1. Belanja Publik

Richard Musgrave, salah satu pemikir ekonomi keuangan publik terbesar pada abad 20, menyatakan bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi dalam menyelenggarakan belanja publik, yakni sebagai berikut (Stiglitz, 2000):

1. Fungsi stabilisasi, pemerintah bertanggung jawab menciptakan perekonomian yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja dengan tingkat harga yang stabil.
2. Fungsi alokasi, pemerintah melakukan intervensi dalam mengalokasi sumber daya. Intervensi langsung dengan membeli barang seperti alat pertahanan dan pendidikan, sedangkan intervensi tidak langsung melalui pajak dan subsidi dengan mendorong beberapa aktivitas dan melarang aktivitas yang lain.
3. Fungsi distribusi, pemerintah peduli terhadap mekanisme pembagian barang yang diproduksi oleh masyarakat kepada seluruh anggota masyarakat. Fungsi ini terkait erat dengan isu seperti keadilan dan *trade off* antara keadilan dengan efisiensi.

Stiglitz (2000) membagi aktivitas ekonomi pemerintah ke dalam empat kategori, yakni produksi barang dan jasa, regulasi dan subsidi produksi swasta, membeli barang dan jasa dan terakhir distribusi pendapatan. Pemerintah dapat melaksanakan produksi atas barang-barang tertentu, seperti layanan pos dan mencetak uang yang diamanatkan konstitusi. Pemerintah bertugas membuat regulasi untuk mengatur interaksi ekonomi antara perusahaan dan individu. Pada jenis barang yang pemerintah tidak memproduksi atau mengkonsumsinya maka pemerintah memberikan pajak atau subsidi kepada pihak swasta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui regulasi. Untuk barang dan jasa yang disediakan kepada publik seperti pertahanan nasional, sekolah publik, dan jalan tol, pemerintah melakukan aktivitas pembelian barang dan jasa tersebut. Aktivitas ekonomi keempat yakni distribusi pendapatan dilakukan pemerintah dengan mengambil uang dari beberapa individu-individu dan memberikannya kepada individu-individu yang lain.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan uang negara termasuk untuk membuat regulasi yang paling sedikit memerlukan biaya

daripada ketiga aktivitas lainnya. Menurut Demery (2000) belanja pemerintah dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal ini mempengaruhi keseimbangan perekonomian makro, seperti defisit fiskal dan perdagangan dan tingkat inflasi. Perubahan ini mempengaruhi standar hidup baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan riil dan tidak langsung melalui perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja publik menciptakan pendapatan secara langsung dan mungkin diantaranya memberikan manfaat untuk keluarga miskin. Pendapatan ini akan menciptakan pendapatan lain melalui efek berganda pendapatan dan pengeluaran tersebut.
3. Belanja publik merupakan transfer kepada masyarakat. Transfer dapat berupa uang tunai, seperti bantuan sosial atau pembayaran asuransi sosial atau *in kind*, seperti subsidi pada layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Transfer dalam bentuk *in kind* dapat meningkatkan standar hidup penerima manfaat secara langsung dan juga potensi pendapatannya dalam jangka panjang.

2.2. Pendidikan sebagai *publicly provided private good*

Barang publik mempunyai ciri *non rivalry* dan *non excludeable*. *Non rivalry* berarti sekali suatu barang disediakan maka biaya tambahan bagi orang lain yang mengkonsumsi barang tersebut adalah nol. *Non excludeable* berarti sulit atau sangat mahal mencegah orang lain untuk menikmati manfaat barang tersebut (Rosen, 2002). Salah satu contoh barang publik adalah pertahanan negara. Setiap warga negara dapat menikmati manfaat dari pertahanan negara walaupun dia tidak membayar pajak. Manfaat yang diterima setiap orang tidak akan berkurang jika ada tambahan warga negara yang menikmati manfaat dari pertahanan negara. Karakteristik barang publik seperti itu akan memunculkan *free rider* sehingga pasar tidak dapat menyediakannya. Dengan alasan tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan barang publik.

Stiglitz (2000) menggolongkan pendidikan sebagai barang privat karena bersifat *rivalry* dan *excludeable*. Pendidikan merupakan barang yang mempunyai *marginal cost* lebih dari nol, berbeda dengan barang publik yang *marginal cost*nya nol. Hal ini berarti penambahan setiap individu yang menggunakan pendidikan akan meningkatkan biaya secara signifikan. Jika penyediaan pendidikan hanya diserahkan kepada pasar dengan

mekanisme harga maka pasar akan menetapkan harga tinggi. Penyediaan pendidikan oleh swasta saja akan menciptakan kondisi jumlah penawaran pendidikan di bawah permintaannya. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan akibat harga penawaran yang diberikan oleh pihak swasta sebagai penyedia layanan pendidikan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk itu akan lebih efisien jika pemerintah menyediakan pendidikan dengan pembiayaan dari pajak. Penyediaan pendidikan oleh pemerintah didefinisikan sebagai *publicly provided private good*.

Rosen (2002) juga mendukung pendidikan digolongkan sebagai *publicly provided private good*. Hal ini berlandaskan bahwa pendidikan mempunyai karakteristik barang publik. Karakteristik tersebut terkandung pada fungsi sekolah dapat berperan sebagai kekuatan untuk sosialisasi. Dia mengutip pernyataan Plutarch, sejarawan Yunani, dalam bukunya *Moral*, "*The very spring and root of honesty and virtue lie in good education*". Inti pernyataan Plutarch tersebut adalah akar dari kejujuran dan moral baik dari seseorang akan tumbuh paling bagus dalam proses pendidikan yang baik. Pernyataan ini mendukung konsep bahwa pendidikan menjadi sarana indoktrinasi politik sehingga masyarakat dapat menerima pemerintah, akhirnya berkontribusi pada stabilitas politik. Pendidikan juga memberikan pengetahuan kepada para pemilih untuk menentukan aliran politik mereka di negara yang menganut sistem demokratis. Dengan demikian negara yang mempunyai kualitas pendidikan bagus akan kokoh sistem politiknya karena masyarakat mempunyai kesadaran berpolitik dengan berlandaskan kejujuran dan moral baik yang dihasilkan oleh proses pendidikan.

Penyediaan layanan pendidikan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Layanan pendidikan tentu saja tidak hanya disediakan pemerintah tanpa memperhitungkan kualitasnya. Hal ini menyangkut arti penting pendidikan yang dapat menentukan kuat tidaknya sistem pemerintahan di suatu negara. Untuk itu pemerintah harus mengalokasikan dananya untuk penyelenggaraan pendidikan dalam jumlah yang signifikan sehingga warga negara dapat memperoleh layanan pendidikan dengan kualitas tinggi dan selanjutnya dapat berkontribusi aktif untuk pengembangan negara. Ada beberapa hal yang mendasari pemerintah melakukan belanja untuk sektor pendidikan ([www.worldbank.org /education/economicsec/finance/public /socialse.htm](http://www.worldbank.org/education/economicsec/finance/public/socialse.htm) dalam Manasan, 2007), yaitu :

1. Pendidikan khususnya pendidikan dasar secara umum memberikan keuntungan bagi masyarakat daripada pribadi atau dengan arti lain pendidikan dasar mempunyai eksternalitas positif yang kuat.
2. Keuntungan dari pendidikan tidak sepenuhnya diterima oleh orang tua maka sebagian besar dari mereka khususnya kelompok miskin mengambil keputusan untuk tidak memberikan kesempatan kepada anaknya bersekolah
3. Biaya pendidikan khususnya pendidikan tinggi biasanya tidak dapat dijangkau oleh keluarga miskin di banyak negara dan mereka juga mengalami kesulitan meminjam uang untuk biaya sekolah dari lembaga keuangan.
4. Pendidikan merupakan faktor yang menentukan tingkat pendapatan individu ke depan dan resep utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dampak yang ditimbulkan oleh belanja pendidikan pada butir keempat di atas disebut efek transfer atau *benefit incidence* dari belanja publik karena mengandung transfer langsung dan transfer modal kepada penerimanya. Transfer langsung dari belanja pendidikan adalah pemberian pengetahuan (aspek kognitif) bagi para peserta didik sehingga murid memperoleh ilmu yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Transfer modal merupakan dampak dari belanja pendidikan berhubungan dengan peningkatan potensi pendapatan individu yang memperoleh layanan pendidikan tersebut. Potensi pendapatan individu meningkat karena individu yang mendapat pendidikan akan memperoleh gaji yang lebih tinggi daripada individu yang tidak memperoleh pendidikan pada saat mereka diterima di pasar tenaga kerja.

2.3. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditetapkan oleh UU Nomor. 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2004 telah mengubah manajemen pelayanan publik. Semula semua bidang pelayanan pemerintah merupakan kewenangan pemerintah pusat, sekarang bergeser ke Pemda, kecuali untuk beberapa bidang yang masih menjadi wewenang pusat. Urusan yang masih menjadi wewenang penuh Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam UU No.22/1999 yang dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2000, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Salah satu kewenangan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan wajib di bidang pendidikan yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 pada PP Nomor 38 Tahun 2007 (Utami, 2010).

Perihal pembiayaan pendidikan diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memberikan pedoman menyeluruh tentang dukungan keuangan bagi setiap tingkat pendidikan dan program. Pemerintah Pusat bertanggung jawab utama untuk menyediakan sumber dana bagi tingkat pendidikan tinggi. Selain tugas utama tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab tambahan dalam pembiayaan pendidikan, yakni memberikan bantuan tambahan atau subsidi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, serta layanan pendidikan khusus. Sementara bagi Pemprov, tanggung jawab utamanya mencakup penyediaan keuangan bagi pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan, serta pendidikan luar biasa. Pemprov juga mendapatkan tanggung jawab tambahan untuk memberikan bantuan tambahan atau subsidi bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non-formal, serta pendidikan tinggi. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab utama untuk menyediakan sumber dana bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tambahan atau subsidi pada layanan pendidikan lainnya, seperti tanggung jawab tambahan yang ada pada Pemerintah Pusat dan Pemprov. Dengan demikian belanja pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya fokus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal. Tabel 2.1 menjelaskan ringkasan pengaturan pembiayaan pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.

Tabel 2.1.
Ringkasan Pengaturan Pembiayaan Pendidikan Antar Pemerintah
Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007

	Pusat	Propinsi	Kabupaten/Kota
Tanggung Jawab Keuangan Utama	- pendidikan tinggi	- pendidikan menengah - pendidikan kejuruan - layanan pendidikan khusus	- pendidikan anak usia dini - pendidikan dasar - pendidikan non formal
Bantuan tambahan/subsidi	- pendidikan anak usia dini - pendidikan dasar - pendidikan menengah - pendidikan non formal - pendidikan khusus - layanan pendidikan khusus	- pendidikan anak usia dini - pendidikan dasar - pendidikan non formal - pendidikan tinggi	

Sumber : PP Nomor 38 Tahun 2007 dalam *World Bank* (2008)

Dalam buku *Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia: Sebuah Kajian Pengeluaran Publik dan Pengelolaan Keuangan pada Tingkat Daerah* (*World Bank*, 2008) dipaparkan mekanisme pendanaan belanja pendidikan yang dilakukan pemerintah berdasarkan penelitian di 10 Kabupaten/Kota. Dana belanja pendidikan Pemerintah Pusat disalurkan kepada Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait dengan beberapa mekanisme, mencakup transfer langsung ke sekolah, dana dekonsentrasi, proyek-proyek APBN, dan proyek-proyek kantor perwakilan pusat. Transfer dana langsung dari Pemerintah Pusat kepada sekolah dilaksanakan berdasarkan per murid. Jenis transfer ini mencakup program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP, dan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk sekolah tingkat menengah.

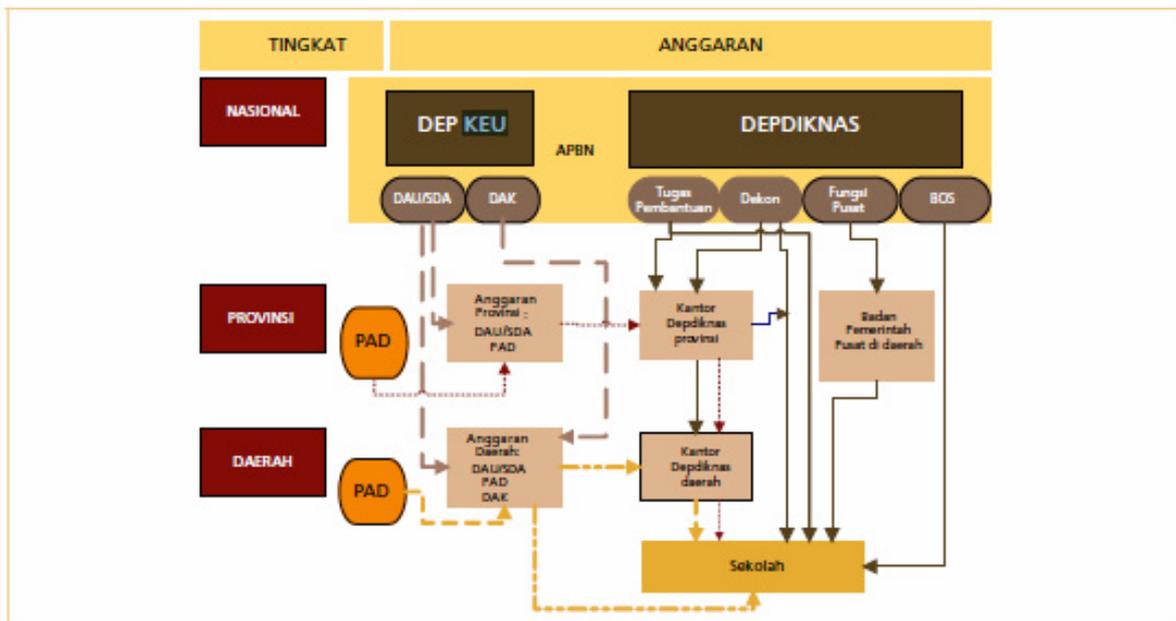
Dana dekonsentrasi mencakup proyek-proyek berbagai kegiatan dan mekanisme pencairan yang beragam. Dana dekonsentrasi seringkali digunakan untuk proyek proyek, seperti rekonstruksi sekolah atau ruang kelas dan peningkatan kualitas sekolah.

Dana tersebut dapat disalurkan langsung ke rekening sekolah atau melalui rekening Dinas Pendidikan Provinsi tergantung pada rancangan khusus suatu proyek. Proyek-proyek dengan dana dekonsentrasi memiliki sifat khusus berkaitan dengan peran provinsi dalam aliran dana. Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pengawasan dan manajemen proyek-proyek yang berada dalam yurisdiksi mereka. Unit pelaksana seperti sekolah dan atau Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota wajib menyerahkan laporan perkembangan dan penyelesaian proyek kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Mekanisme pembiayaan lainnya adalah melalui proyek-proyek APBN, yang didanai, serta dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Pusat. Dalam proyek jenis ini, Pemerintah Pusat secara langsung menyediakan barang dan atau jasa kepada sekolah, contohnya sekolah-sekolah menerima perlengkapan multimedia (TV, komputer) yang didistribusikan secara langsung oleh lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dalam proyek multimedia nasional. Begitu juga di daerah-daerah yang terdapat kantor perwakilan Kemendiknas, dana Pemerintah Pusat kadang-kadang masih disalurkan langsung kepada kantor perwakilan tersebut, contoh Kemendiknas menyalurkan anggaran pelatihan guru di Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang berkedudukan di Semarang.

Disamping Pemerintah Pusat, Pemprov juga menyediakan dana untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten atau sekolah. Provinsi juga membayar gaji guru kontrak, memberikan insentif kepada para guru di daerah terpencil, dan membiayai kegiatan rehabilitasi sekolah. Di tingkat kabupaten/kota, proses pengalokasian dana operasional dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada sekolah-sekolah antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya tidak selalu seragam. Di sebagian besar kabupaten/kota, Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja terkait dengan kegiatan koordinasi dan manajemen pendidikan. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota menjalani proses yang sama dalam hal koordinasi proses penganggaran untuk sekolah-sekolah dasar. Namun proses penganggaran untuk SMP dan SMA/SMK berbeda-beda.

Pendanaan untuk sektor pendidikan di tingkat kabupaten/kota dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme pendanaan untuk belanja pendidikan di Indonesia seperti yang disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arus Dana dalam Belanja Pendidikan

Sumber: *World Bank* (2008)

2.4. Penelitian sebelumnya

Pada tahun 1979 Selowsky melakukan BIA pada belanja pendidikan di Colombia dan Meerman melakukan penelitian serupa di Malaysia (Juswanto, 2010). Selowsky melakukan survei terhadap 4.019 rumah tangga untuk meneliti siapa yang menerima manfaat dari sepertiga belanja pemerintah yang dialokasikan pada subsidi pendidikan dan kesehatan, listrik, air minum, dan *sewerage*. Dia menemukan total subsidi pendidikan dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat yang telah dibagi menurut segmentasi pendapatannya. Subsidi pendidikan dasar bersifat progresif, sedangkan subsidi pendidikan tinggi bersifat regresif. Hal yang sama juga disimpulkan oleh Meerman dalam penelitiannya di Malaysia bahwa sebagian besar subsidi pendidikan dasar terdistribusikan kepada kelompok miskin, sedangkan subsidi pendidikan tinggi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi.

Demery (2000) dalam bukunya *“Benefit Incidence : A Practitioner’s Guide”* mengutip penelitian *“Indonesia: Public Expenditures, Prices and the Poor”* oleh World Bank (1993). Penelitian tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 1989 kelompok masyarakat termiskin menikmati manfaat subsidi pendidikan dasar sebesar 22% tetapi mereka tidak menikmati subsidi pendidikan tinggi. Kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi menikmati 92% subsidi pendidikan tinggi yang diberikan pemerintah. Lanjouw et al (2001) melakukan BIA pada subsidi pendidikan dan kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data Susenas 1998. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa belanja pendidikan sekolah dasar bersifat progresif. Persentase manfaat belanja sekolah dasar paling tinggi diterima kelompok termiskin dan nilai manfaat turun dari kuantil pertama ke kuantil kelima. Kelompok termiskin menikmati 24,8 % subsidi pendidikan sekolah dasar. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 23,5%, kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 20,7%, kuantil keempat menerima manfaat sebesar 17,8%, dan kelompok terkaya menikmati manfaat paling kecil yakni 13,1%. Belanja pendidikan sekolah menengah dalam penelitian tersebut disimpulkan bersifat regresif. Kelompok terkaya menikmati paling besar subsidi pendidikan sekolah menengah yakni 33,7% dan nilai manfaat menurun dari kuantil kelima ke kuantil pertama. Kuantil keempat menerima manfaat sebanyak 23,9%, kuantil ketiga menerima manfaat sebanyak 18,7%, kuantil kedua menerima manfaat sebanyak 14,2%, dan kelompok termiskin menerima manfaat paling kecil yakni 9,5%.

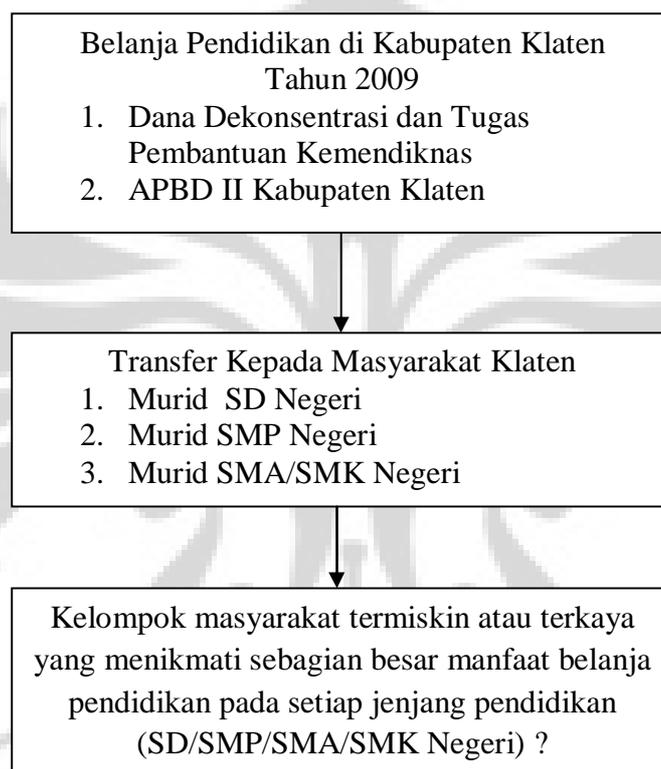
Hasil studi di atas ditegaskan kembali oleh penelitian Juswanto (2010). Juswanto menggunakan data Susenas 2005, realisasi belanja dan data murid dari Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005. Juswanto menggabungkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pendidikan dasar karena program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Kategori pendidikan di atas pendidikan dasar, yakni SMA/SMK dan Universitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja pendidikan dasar bersifat progresif. Sebagian besar belanja pemerintah untuk pendidikan dasar dinikmati oleh kelompok masyarakat termiskin yakni 23,8 %. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 22,3%, kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 20,6%, kuantil keempat menerima manfaat sebesar 18,3%, dan kelompok terkaya menerima manfaat paling kecil yakni 15%. Sebaliknya belanja pendidikan untuk

perguruan tinggi bersifat regresif. Kelompok masyarakat terkaya menikmati paling besar manfaat belanja pendidikan pada tingkat Universitas sebanyak 60%. Kuantil keempat menerima manfaat sebanyak 19,5%, kuantil ketiga menerima manfaat sebanyak 10,8%, kuantil kedua menerima manfaat sebanyak 5,7%, dan kelompok termiskin menerima manfaat paling kecil yakni 4%. Belanja pendidikan untuk sekolah menengah juga bersifat regresif. Kelompok terkaya menerima manfaat paling besar yakni 30,9%. Kuantil keempat menerima manfaat sebesar 24,9%, kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 19,2%, kuantil kedua menerima manfaat sebesar 14,6%, dan kelompok termiskin menerima manfaat paling kecil yaitu 10,5%.

Penelitian BIA di atas hanya menggambarkan distribusi belanja pendidikan pada satu tahun tertentu sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan distribusi belanja pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya. Walle (1992) pernah melakukan penelitian perbandingan tentang distribusi manfaat dari layanan sosial di Indonesia antara tahun 1978 dengan 1987. Walle membagi masyarakat menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni tingkat bawah (40% kuantil terbawah), tingkat menengah (30% kuantil menengah), dan tingkat teratas (30% kuantil teratas). Hasil studi tersebut juga menyimpulkan bahwa sebagian besar subsidi pemerintah untuk sekolah dasar dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tingkat bawah pada tahun 1978 dan 1987. Perubahan distribusi subsidi pendidikan yang signifikan terjadi pada belanja pendidikan untuk SMP, SMA/SMK, dan Universitas. Manfaat subsidi pendidikan yang dinikmati oleh kelompok tingkat rendah semakin meningkat pada tingkat pendidikan SMP, SMA/SMK, dan Universitas pada tahun 1987 dibandingkan tahun 1978. Pada tingkat SMP, persentase subsidi yang diterima oleh kelompok termiskin naik dari 45% (1978) menjadi 58% (1987). Kenaikan manfaat yang diterima oleh kelompok termiskin pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi lebih signifikan dibandingkan pada tingkat SMP. Persentase subsidi pendidikan SMA/SMK yang dinikmati oleh kelompok termiskin naik hampir dua kali lipat, yakni 22% (1978) menjadi 43% (1987). Kenaikan subsidi pendidikan perguruan tinggi yang diterima oleh kelompok termiskin lebih tinggi lagi, yakni lebih dari tiga kali lipat. Pada tahun 1978 kelompok berpendapatan rendah hanya menerima 7% dari belanja pemerintah untuk perguruan tinggi, sedangkan pada tahun 1987 mereka dapat menikmati 24% dari total belanja tersebut.

2.5. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah

Teori dan hasil-hasil penelitian terkait belanja publik pendidikan yang dijelaskan sebelumnya menjadi dasar pemikiran untuk memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir dalam pemecahan masalah penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2.2.

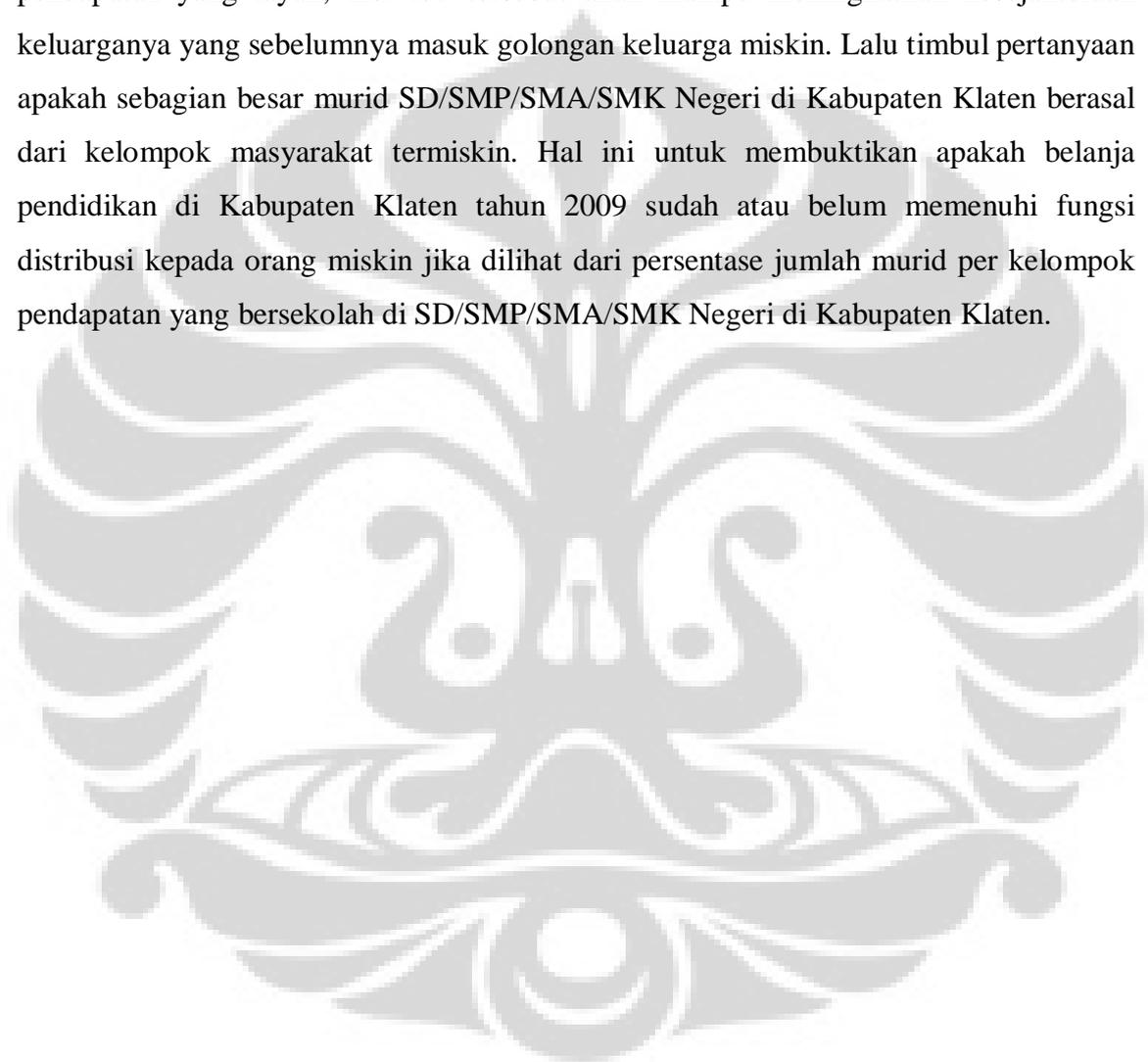


Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah

Gambar di atas memperlihatkan alur belanja pendidikan dan penerima manfaatnya di Kabupaten Klaten. Alur tersebut dimulai dari belanja pendidikan yang sumber dananya dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kemendiknas dan APBN Kabupaten Klaten. Belanja pendidikan tersebut ditujukan kepada masyarakat Klaten dan sebagian besar belanja itu diterima oleh murid SD/SMP/SMA/SMK Negeri sebagai sekolah-sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Belanja pendidikan untuk melaksanakan fungsi distribusi sebagai salah satu peran ekonomi Pemkab Klaten. Tujuan belanja pendidikan untuk pemerataan pendapatan kepada masyarakat miskin. Pemerataan pendapatan dapat terjadi jika masyarakat miskin menikmati sebagian besar dari manfaat belanja pendidikan.

Pendidikan mempunyai dampak transfer modal, yakni potensi pendapatan individu yang mendapatkan pendidikan akan naik. Individu dari kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pendidikan diharapkan akan memperoleh pendapatan yang layak saat memasuki pasar kerja dengan bekal pengetahuan dan ketrampilannya. Dengan pendapatan yang layak, individu tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang sebelumnya masuk golongan keluarga miskin. Lalu timbul pertanyaan apakah sebagian besar murid SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten berasal dari kelompok masyarakat termiskin. Hal ini untuk membuktikan apakah belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 sudah atau belum memenuhi fungsi distribusi kepada orang miskin jika dilihat dari persentase jumlah murid per kelompok pendapatan yang bersekolah di SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten.



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini hanya fokus pada belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 sesuai dengan batasan masalah penelitian yang dijelaskan pada bab pertama. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penelitian ini hanya fokus pada belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi belanja Pemkab Klaten terbaru yang tersedia yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2010.
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul “Keterangan Sosial Budaya dan Pendidikan” terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni survei tahun 2009. Survei ini dilaksanakan tiga tahun sekali dan menyediakan data pengguna layanan pendidikan terbaru menurut kategori penyelenggara sekolahnya di wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Klaten. Data tersebut menjadi dasar penelitian ini karena anggota rumah tangga yang aktif sekolah bisa dibagi menurut jenis sekolahnya, seperti sekolah negeri atau sekolah swasta. Data ini tidak terdapat dalam Susenas Kor yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun.

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menekankan pada analisis manfaat belanja pendidikan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan pada setiap jenjang pendidikan. Untuk mengetahui permasalahan lebih detail terkait distribusi manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini untuk mendeskripsikan data-data numerik secara lebih jelas dan mendalam berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel setelah data lapangan diolah kembali oleh peneliti. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih mendalam dan utuh mengenai dampak kebijakan belanja pendidikan dan distribusi penerima manfaatnya di Kabupaten Klaten sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan

belanja pendidikan serta distribusi dari alokasi belanja tersebut dalam program pemerintah selanjutnya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengetahui jumlah belanja pendidikan dan distribusi manfaat dari belanja pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi terkait dengan obyek penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kemendiknas untuk Kabupaten Klaten tahun 2009 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemkab Klaten.
2. Data jumlah murid SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun ajaran 2009/2010 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemkab Klaten.
3. Data realisasi belanja Dinas Pendidikan untuk SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri dalam APBD Kabupaten Klaten tahun 2009. Data ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
4. Data pengguna layanan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten tahun 2009 yang terdiri dari data pengeluaran rumah tangga per bulan, jumlah anggota rumah tangga, usia, anggota rumah tangga yang bersekolah dan penyelenggara sekolahnya. Data ini terdapat dalam Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Kor “Keterangan Pokok Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga” dan Modul “Keterangan Sosial Budaya dan Pendidikan” di Kabupaten Klaten tahun 2009. Data Susenas Kor dan Modul tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data pengeluaran rumah tangga per bulan diambil dari Susenas Kor. Data jumlah anggota rumah tangga, usia, anggota rumah tangga yang bersekolah dan penyelenggara sekolahnya diperoleh dari Susenas Modul.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui belanja per murid dan distribusi manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten. Tujuan ini akan berhasil jika penelitian ini dapat mendefinisikan obyek pengamatan penelitian secara tepat. Penelitian ini menetapkan variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

1. Belanja pendidikan adalah belanja pendidikan yang tercatat pada realisasi belanja Dinas Pendidikan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009 untuk SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri ditambah dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kemendiknas tahun 2009 yang diterima oleh SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten.
2. Jumlah murid adalah jumlah orang yang tercatat dalam data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai murid SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun ajaran 2009/2010.
3. Pendapatan rumah tangga adalah pengeluaran masing-masing rumah tangga per bulan yang tercatat dalam Susenas Kor tahun 2009.
4. Pengguna layanan pendidikan adalah jumlah orang yang berasal dari tiap kuantil kelompok pendapatan yang terdata sebagai murid SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Susenas Modul tahun 2009 di Kabupaten Klaten .
5. Individu usia sekolah adalah individu usia 7-12 tahun untuk SD, individu usia 13–15 tahun untuk SMP, dan individu 16–18 tahun untuk SMA/SMK yang tercatat dalam Susenas Modul tahun 2009.

3.4. *Benefit Incidence Analysis*

BIA adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti efek dari kebijakan pajak atau subsidi pemerintah terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, BIA untuk evaluasi distribusi subsidi pemerintah diantara kelompok berbeda dalam populasi khususnya kelompok masyarakat yang dibagi menurut kategori tingkat pendapatannya. Hasil BIA menjadi landasan untuk menentukan apakah program subsidi pemerintah sudah tepat sasaran, yakni

manfaatnya diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jika kelompok termiskin yang merupakan sasaran utama dari subsidi pemerintah hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat belanja tersebut dan sebagian besar manfaatnya diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi maka kebijakan pemerintah ini dapat digolongkan sebagai program yang gagal.

Menurut perkembangan metode ini, BIA lebih banyak dilakukan terhadap empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, fasilitas air bersih atau sanitasi, dan infrastruktur lainnya. Empat sektor tersebut sering menjadi obyek dari penelitian yang menggunakan BIA karena keempat sektor itu berkaitan erat dengan aspek keadilan dan pemberantasan kemiskinan. Aspek keadilan dan pemberantasan kemiskinan merupakan perhatian utama metode BIA yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Untuk menjelaskan tahap-tahap dan kegunaan dari metode BIA secara lebih mudah kepada masyarakat maka BIA terhadap belanja pendidikan merupakan prioritas utama sebagai contoh kasus. Menurut Demery (2000) ada empat faktor yang melandasi kenapa BIA terhadap belanja pendidikan merupakan kasus yang paling mudah untuk menjelaskan tentang BIA, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan layanan paling utama bagi orang miskin supaya mereka terlepas dari lingkaran kemiskinan yang sebelumnya membelenggunya. Dalam analisis ekonomi makro dan mikro, pendidikan merupakan faktor penting untuk memberantas kemiskinan.
2. Belanja publik pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan dasar mampu menciptakan manfaat eksternal yang tinggi. Untuk itu setiap pemerintah selalu menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan dasar di negaranya.
3. Pemerintah biasanya memberikan proporsi yang signifikan dari total anggarannya untuk bidang pendidikan.
4. Data pengguna layanan pendidikan atau partisipasi sekolah dari penduduk biasanya masuk dalam komponen survei keluarga.

BIA terhadap belanja pendidikan dapat lebih mudah dipahami karena bidang pendidikan merupakan sektor penting dalam suatu negara dan data yang diperlukan untuk analisis tersebut mudah didapat. Begitupun juga dalam hal metode, BIA mudah untuk dilakukan sebagai alat analisis terhadap distribusi belanja pemerintah. BIA bukan hanya mudah digunakan pada analisis distribusi manfaat belanja pendidikan saja tetapi juga pada bidang kesehatan, fasilitas air bersih atau sanitasi serta infrastruktur lainnya. BIA sebagai metode analisis terdiri dari lima langkah mudah yang dijalankan dengan menggunakan program *spreadsheet software* yang sederhana. Lima langkah dalam BIA adalah sebagai berikut (Davoodi, 2003):

1. Hitung biaya rata-rata per unit untuk menyediakan layanan publik, dengan membagi belanja pemerintah untuk layanan publik tersebut dengan jumlah pengguna layanan publik tersebut. Sebaiknya belanja pemerintah tersebut sudah dikurangi dengan biaya *cost recovery* dan pengeluaran pribadi yang dilakukan oleh pengguna layanan.

Pengguna layanan publik merupakan pihak yang paling diuntungkan atas layanan tersebut, seperti murid di sekolah dasar atau pasien yang berobat ke klinik kesehatan. Walaupun guru sebagai penerima belanja pendidikan yang paling besar dalam bentuk gaji dan tunjangan yang lain tetapi mereka bukan merupakan kelompok utama yang mendapatkan keuntungan dari belanja pendidikan.

2. Definisikan rata-rata manfaat per unit dari belanja pemerintah di atas sebagai biaya rata-rata penyediaan layanan publik tersebut.
3. Buat peringkat populasi pengguna layanan publik tersebut dari individu atau rumah tangga termiskin sampai terkaya dengan menggunakan ukuran kesejahteraan dan gabungkan mereka dalam tiap-tiap kelompok dengan jumlah pengguna yang sama.

Langkah ini sederhana tetapi perlu mempertimbangkan beberapa alternatif unit analisis. Unit analisis dalam survei keluarga dapat diambil dalam unit keluarga dengan asumsi semua anggota keluarga bersama atau dalam unit seorang individu dalam keluarga. Demikian juga dengan ukuran kesejahteraan, unit analisis dapat berdasarkan pendapatan atau konsumsi. Kedua pilihan unit

analisis tersebut dibutuhkan dalam pemeringkatan pengguna layanan. Peringkat pengguna layanan dalam BIA biasanya dalam bentuk kuantil dan desil.

Bentuk pemeringkatan lain bisa dimungkinkan karena adanya keterbatasan penelitian, seperti kategori miskin dan tidak miskin dengan menggunakan garis kemiskinan sebagai pembatas, kota dengan desa, laki-laki dengan perempuan, etnis, agama, umur, ras, atau latar belakang pendidikan orang tua. Informasi tersebut biasanya dapat didapatkan dari survei kemiskinan dan atau kesehatan serta kependudukan.

4. Tentukan distribusi manfaat dengan mengkalikan rata-rata manfaat dengan jumlah pengguna layanan publik pada masing-masing kelompok berdasarkan pendapatan atau konsumsi atau kategori lainnya seperti yang sudah ditentukan pada tahap ketiga.

Langkah ini mengasumsikan bahwa rata-rata manfaat atau biaya penyediaan layanan publik tidak ada perbedaan diantara kelompok pengguna dengan tingkat pendapatan atau konsumsi atau faktor lain yang berbeda. BIA mengasumsikan bahwa kualitas layanan publik sama antara di desa dan di kota. BIA mengingkari potensi efek dari korupsi atau kualitas manajemen belanja publik. Kedua hal ini dapat menghasilkan manfaat yang berbeda atas belanja publik walaupun angka nominal belanja yang terdistribusi untuk setiap individu atau rumah tangga adalah sama.

5. Bandingkan hasil distribusi manfaat antar kelompok pengguna layanan publik.

Langkah terakhir ini merupakan komponen paling penting BIA karena analisis ini dapat memberikan masukan kepada pemegang kebijakan mengenai keakuratan belanja pemerintah atas suatu layanan publik. Langkah ini juga dapat menjadi dasar perbandingan yang akurat antar berapa jenis belanja pemerintah untuk menentukan program mana yang berjalan lebih efektif, misalnya belanja pendidikan dasar dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Analisis ini juga dapat menjadi perbandingan keakuratan belanja pemerintah tahun sekarang dengan tahun sebelumnya atau belanja pemerintah dengan belanja negara lain atas layanan publik yang sama.

Selain tahap-tahap dalam metode BIA dapat disampaikan dalam bentuk paparan, penghitungan dengan BIA juga dapat ditulis dalam persamaan

matematika. Model persamaan matematika BIA seperti dibawah ini (Demery, 2000) :

$$X_j \equiv \sum_{i=1}^3 E_{ij} \frac{S_i}{E_i} \equiv \sum_{i=1}^3 \frac{E_{ij}}{E_i} S_i \quad (3.1)$$

Keterangan :

X_j : nilai total belanja pendidikan yang diterima kelompok j

E_{ij} : jumlah murid dari kelompok j yang masuk tingkat pendidikan i

S_i : belanja pendidikan pada tingkat pendidikan i

E_i : jumlah total murid pada tingkat pendidikan i

i (1,..,3) : tanda tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan universitas)

S_i/E_i adalah unit subsidi yang diterima oleh setiap murid pada jenjang pendidikan tingkat i. Demery memberikan catatan bahwa persamaan ini mengasumsikan subsidi yang diterima pada tingkat pendidikan yang berbeda oleh tiap kelompok berdasarkan pendapatan tetapi tidak memperhitungkan perbedaan kelompok tersebut pada aspek lain. Padahal subsidi pemerintah atas layanan publik dibedakan secara signifikan menurut daerah asal individu atau rumah tangga. Layanan publik di kota biasanya mendapat subsidi lebih tinggi daripada di desa. Begitu juga pendanaan layanan publik di ibukota seringkali lebih baik daripada di kota-kota lain. Demery mengatakan bahwa variasi dalam unit subsidi yang menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat seharusnya diperhitungkan dalam analisis ini.

BIA sebagai sebuah metode analisis masih mempunyai kekurangan seperti yang dijelaskan oleh Demery di atas. Jika data mengenai variasi daerah asal para penerima manfaat dapat diakses oleh peneliti maka Demery memberikan rumus tambahan supaya hasil BIA lebih mampu menggambarkan aspek keadilan dalam unit subsidi yang diterima oleh individu atau rumah tangga yang tinggal di daerah yang beragam karakteristiknya Selain itu, BIA sebagai sebuah metode analisis juga masih mempunyai beberapa keterbatasan sehingga hasil penelitian yang menggunakan BIA masih memiliki beberapa kekurangan. Manasan (2007) mengungkapkan empat keterbatasan dari metode BIA, yaitu :

1. BIA mengasumsikan bahwa manfaat dari layanan publik sama dengan biaya rata-rata penyediaan layanan publik tersebut.

2. BIA tidak dapat menggambarkan efek putaran kedua pada kesejahteraan yang dihasilkan oleh layanan publik tersebut. Manfaat tidak langsung dari beberapa layanan publik dimungkinkan berdampak bagi distribusi kesejahteraan sepanjang waktu.
3. BIA secara umum menetapkan distribusi pada manfaat rata-rata. Padahal distribusi manfaat marginal yang mencerminkan keadilan adalah penting.
4. BIA tidak menghitung pengaruh jangka panjang belanja pemerintah pada kelompok yang diuntungkan.



BAB 4

ANALISIS DISTRIBUSI MANFAAT BELANJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN

Pada bab ini akan diuraikan analisis distribusi manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 pada tiap kelompok pendapatan. Analisis ini dimulai dari penghitungan belanja rata-rata yang diterima per murid tiap jenjang pendidikan. Belanja tersebut selanjutnya didistribusikan menurut jumlah murid tiap tingkat pendidikan yang terdapat pada masing-masing kelompok pendapatan. Hasil manfaat yang diterima tiap kelompok pendapatan kemudian diperbandingkan untuk mengetahui apakah manfaat belanja pendidikan sudah tepat sasaran atau belum, yakni kelompok termiskin menerima sebagian besar dari alokasi belanja pendidikan. Penilaian tersebut akan diperbandingkan dengan penghitungan distribusi manfaat marginal yang diterima masing-masing kelompok pendapatan dan dilengkapi dengan analisis faktor-faktor yang terkait sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman kenapa distribusi belanja pendidikan tersebut sudah atau belum sesuai dengan tujuannya dari fungsi belanja pendidikan yakni distribusi pendapatan.

4.1. Belanja Pendidikan per Murid

Pendanaan belanja pendidikan di Kabupaten Klaten berasal dari beberapa pihak, yakni pemerintah, yayasan, orang tua, dan pihak lainnya. Dana pendidikan dari pemerintah berasal dari tiga sumber, adalah sebagai berikut Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemkab Klaten. Penelitian ini membahas belanja pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemkab Klaten. Studi ini hanya meneliti belanja pendidikan yang didanai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kemendiknas sebagai sumber dana dari Pemerintah Pusat dan APBD Kabupaten Klaten sebagai sumber dana dari Pemkab Klaten.

Dana dekonsentrasi dari Kemendiknas dilaksanakan oleh beberapa unit Eselon 1 di lingkungan Kemendiknas. Salah satunya adalah dana dekonsentrasi yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen). Alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar Rp 2.438.410.048.000. Dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada semua Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk dana BOS SD dan SMP sejumlah Rp 2.025.133.960.000 atau sekitar 83% dari total dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen (lihat Lampiran 2). Berdasarkan data tersebut bahwa alokasi dana untuk BOS SD dan SMP merupakan mayoritas dari anggaran dana dekonsentrasi dari Ditjen Mandikdasmen maka penelitian ini hanya memasukkan realisasi dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Klaten sebagai salah satu komponen belanja pendidikan yang diteliti.

Pada tahun 2009 BOS SD di kota ditetapkan sebesar Rp 400.000 per murid tiap tahun sedangkan BOS SD di kabupaten sebanyak Rp 397.000 per murid tiap tahun. BOS SMP di kota sebanyak Rp 575.000 per murid untuk satu tahun sedangkan BOS SMP di kabupaten sebanyak Rp 570.000 per murid untuk satu tahun. (Suyanto, 2009). Pemerintah memberikan BOS kepada semua SD/SMP baik sekolah negeri maupun swasta. Sekolah yang menolak menerima dana BOS maka sekolah tersebut dilarang memungut biaya dari peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik. BOS SD per murid sebesar Rp 397.000 tiap tahun dan BOS SMP sebanyak Rp 570.000 per murid tiap tahun di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2009 semua siswa SD dan SMP baik negeri dan swasta di Kabupaten Klaten menerima dana BOS. Namun penelitian ini hanya meneliti BOS untuk SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 sehingga data BOS untuk SD swasta dan SMP swasta tidak diperhitungkan. Salah satu contohnya adalah dana BOS untuk SD Kanisius di Kecamatan Klaten Tengah dan dana BOS SMP Pangudi Luhur I di Kecamatan Klaten Utara tidak diperhitungkan dalam komponen belanja yang diteliti karena dua sekolah tersebut merupakan sekolah swasta. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, realisasi dana BOS untuk SD Negeri sebesar Rp 40.618.459.500 dan realisasi dana BOS untuk SMP Negeri yakni Rp 23.376.555.000 pada tahun 2009.

Selain dana dekonsentrasi dari Kemendiknas, sumber dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Klaten dimungkinkan berasal dari tugas pembantuan Kemendiknas. Dalam data realisasi dana tugas pembantuan dari Kemendiknas yang didapat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

diperoleh informasi bahwa Kabupaten Klaten tidak menerima dana tugas pembantuan dari Kemendiknas pada tahun 2009. Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menerima dana tugas pembantuan dari Kemendiknas pada tahun 2009 adalah sebagai berikut Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri (lihat Lampiran 3). Berdasarkan data tersebut maka dana tugas pembantuan dari Kemendiknas tidak dimasukkan sebagai komponen belanja pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dalam penelitian ini.

Komponen belanja pendidikan berikutnya yang diteliti adalah belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten tahun 2009. Belanja pendidikan dalam APBD Kabupaten Klaten dicatat pada unit Dinas Pendidikan yang terbagi dalam tujuh sub unit, yakni sub unit Dinas Pendidikan, TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKB (Sarana Kegiatan Belajar). Dalam penelitian ini yang dijadikan komponen belanja pendidikan adalah realisasi belanja yang ada di sebagian belanja dalam sub unit Dinas Pendidikan dan total realisasi belanja dalam sub unit SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri (lihat Lampiran 4). Sebagian belanja dalam sub unit Dinas Pendidikan tidak dimasukkan sebagai komponen belanja pendidikan yang diteliti karena realisasi belanja tersebut sulit dipisahkan menurut penerima manfaatnya pada setiap jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK Negeri), sebagai contoh, belanja gaji pegawai di sub unit Dinas Pendidikan sulit dipisahkan manfaat yang diterima oleh masing-masing jenjang pendidikan. Ada juga belanja yang dicatat dalam sub unit Dinas Pendidikan yang berupa kegiatan fisik dan non fisik lainnya sebagai belanja untuk SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) atau SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau SMA/MA (Madrasah Aliyah) sehingga belanja tersebut dimungkinkan diterima oleh MI/MTs/MA Negeri. Tetapi realisasi belanja itu tetap dimasukkan sebagai komponen belanja SD/SMP/SMA Negeri dalam penelitian ini. Pertimbangan yang mendasari keputusan ini adalah MI/MTs/MA berada di bawah kewenangan Kementerian Agama yang mengurus bidang agama sebagai urusan yang masih dipegang Pemerintah Pusat menurut UU sehingga kecil kemungkinan mereka

mendapatkan alokasi anggaran dari Kemendiknas maupun APBD Kabupaten Klaten.

Dana belanja pendidikan untuk SD Negeri pada tahun 2009 yang diteliti terdiri dari dua sumber, yakni BOS dari Pemerintah Pusat dan gaji pegawai serta kegiatan fisik dan non fisik lainnya untuk SD Negeri yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten. Belanja pendidikan SD Negeri di Kabupaten Klaten didominasi oleh belanja pegawai yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, yakni 86,76% dari total belanja SD Negeri. Pemerintah Pusat hanya memberikan kontribusi sebesar 12,79% dalam bentuk penyaluran dana BOS kepada SD Negeri dan sisanya sejumlah 0,45% berupa belanja untuk kegiatan fisik dan non fisik lainnya yang dibiayai APBD Kabupaten Klaten.

Komponen belanja pendidikan untuk SMP Negeri di Kabupaten Klaten yang diteliti juga bersumber dari Pemerintah Pusat berupa BOS dan dari Pemkab berupa gaji pegawai, pendamping biaya operasional sekolah, dan kegiatan fisik dan non fisik lainnya untuk SMP Negeri. Ada perbedaan antara realisasi belanja SMP Negeri dan SD Negeri. Pemkab Klaten mengalokasikan belanja pendampingan biaya operasional sekolah untuk SMP Negeri sedangkan SD Negeri tidak mendapatkannya. Namun begitu mayoritas belanja pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Klaten tetap saja digunakan untuk gaji pegawai sama seperti belanja untuk SD Negeri. Jumlah belanja untuk gaji pegawai sebesar 78,1% dari total belanja untuk SMP Negeri. Kontribusi Pemerintah Pusat pada belanja untuk SMP Negeri hanya sebesar 17,75% berupa dana BOS. Selain gaji pegawai, APBD Kabupaten Klaten juga masih berkontribusi sebesar 4,15% dalam bentuk pendampingan biaya operasional SMP Negeri dan kegiatan fisik dan non fisik lainnya.

Dana belanja untuk sekolah menengah (SMA/SMK) Negeri di Kabupaten Klaten yang diteliti dalam studi ini hanya berasal dari sumber APBD Kabupaten Klaten karena SMA/SMK Negeri tidak mendapatkan dana BOS dari Pemerintah Pusat. Dalam data anggaran dana dekonsentrasi dari Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (lihat Lampiran 2) tercatat ada alokasi untuk SMA/SMK, seperti Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA/SMK. Alokasi BKMM untuk Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar Rp 67.831.140.000 yang terdiri dari Rp 22.447.620.000 untuk 28.779 siswa SMA dan 45.383.520.000 untuk 58.184 siswa SMK se-Jawa Tengah. Murid SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten dimungkinkan ada yang menerima dana dekonsentrasi tersebut. Karena keterbatasan waktu untuk memperoleh data tersebut maka penelitian ini tidak memasukkan belanja tersebut sebagai bagian dari penelitian.

Belanja SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten juga masih didominasi oleh gaji pegawai yakni sebesar 88,25%, seperti belanja untuk SD Negeri dan SMP Negeri. Namun kegiatan fisik dan non fisik lainnya dalam belanja sekolah menengah negeri sebesar 11,75% atau paling tinggi dibandingkan dengan belanja serupa untuk SD Negeri dan SMP Negeri. Komposisi belanja pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Komposisi Realisasi Belanja Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Komponen Belanja	SD		SMP		SMA/SMK	
	Jumlah (Rp juta)	%	Jumlah (Rp juta)	%	Jumlah (Rp juta)	%
BOS	40.618	12,79	23.376	17,75	0	0
Gaji Pegawai	275.460	86,76	102.863	78,10	55.309	88,25
Biaya Operasional	0	0	3.193	2,42	0	0
Kegiatan fisik dan non fisik lainnya	1.422	0,45	2.281	1,73	7.361	11,75
Total	317.500	100	131.713	100	62.670	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Perda No. 5 Tahun 2010 Kabupaten Klaten, telah diolah kembali

Kabupaten Klaten memiliki sejumlah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri. Pada tahun 2009 jumlah SD Negeri di Klaten adalah 766 buah, sedangkan SMP Negeri sejumlah 65 buah. Sekolah menengah negeri yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 31 buah yang terdiri dari 16 buah SMA dan 10 buah SMK. Jumlah murid SD Negeri pada tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 102.017 orang dan murid SMP Negeri sebanyak 40.361 orang. Murid sekolah menengah negeri sebanyak 20.500 orang yang terdiri dari murid SMA sejumlah 12.024 orang dan murid SMK sejumlah 8.476 orang.

Untuk mendapatkan nilai belanja per murid tiap tingkat pendidikan maka total belanja pendidikan per tingkat pendidikan dibagi dengan jumlah pengguna layanan pendidikan tiap jenjang pendidikan. Belanja pendidikan rata-rata murid SD Negeri di Kabupaten Klaten adalah total belanja SD Negeri (Rp 317.551.679.410) dibagi jumlah murid SD Negeri (102.017 orang), yakni Rp 3.112.733 per murid. Belanja pendidikan rata-rata murid SMP Negeri adalah total belanja SMP Negeri (Rp 131.713.241.496) dibagi dengan jumlah murid SMP Negeri (40.361 orang), yakni Rp 3.263.379 per murid. Belanja pendidikan rata-rata per murid sekolah menengah (SMA/SMK) Negeri sejumlah Rp 3.057.098 merupakan hasil pembagian total belanja sebesar Rp 62.670.513.196 dengan jumlah murid sebanyak 20.500 orang. Besarnya belanja rata-rata pendidikan tiap tingkat pendidikan di Kabupaten Klaten ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Belanja Pendidikan Rata-rata per Murid SD/SMP/SMA/SMK Negeri
di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Jenis Sekolah	Total Belanja (Rp)	Jumlah Murid (orang)	Belanja per Murid (Rp)
SD Negeri	317.501.145.710	102.017	3.112.238
SMP Negeri	131.713.241.496	40.361	3.263.379
SMA/SMK Negeri	62.670.513.196	20.500	3.057.098

Sumber : Dinas Pendidikan dan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Kabupaten Klaten, telah diolah kembali

Dilihat dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa belanja pendidikan rata-rata per murid SMP Negeri lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pendidikan rata-rata per murid SD Negeri. Belanja pendidikan rata-rata per murid sekolah menengah negeri lebih kecil dibandingkan dengan belanja rata-rata per murid SD Negeri dan SMP Negeri. Kecilnya belanja pendidikan rata-rata per murid SMA/SMK Negeri mungkin disebabkan dengan tidak dimasukkan belanja pendidikan di Kabupaten Klaten yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini. Menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan merupakan tanggung utama Pemprov (lihat Tabel 2.1) maka kemungkinan mayoritas belanja pendidikan menengah negeri di Kabupaten Klaten didanai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu rendahnya belanja per murid SMA/SMK Negeri dapat juga disebabkan dengan tidak dimasukkannya belanja dana dekonsentrasi dari Kemendiknas untuk SMA/SMK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

4.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 sebanyak 1.307.970 jiwa. Dari total penduduk di Kabupaten Klaten tersebut penduduk yang berusia sekolah sejumlah 203.718 orang atau sebesar 15,57% dari jumlah penduduk. Penduduk usia sekolah terdiri dari tiga kategori umur, sebagai berikut 7–12 tahun untuk SD, 13–15 tahun untuk SMP, dan 16–18 tahun untuk SMA/SMK. Jumlah penduduk usia 7 –12 tahun sebanyak 93.117 orang atau 45,71% dari total penduduk usia sekolah dan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sebanyak 57.081 orang atau 28,02% dari total penduduk usia sekolah. Jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebanyak 53.520 orang atau 26,27% dari total penduduk usia sekolah. Dilihat dari persentasenya penduduk usia 7–12 tahun merupakan kelompok terbesar dalam kelompok penduduk usia sekolah. Kelompok usia 16–18 tahun merupakan kelompok usia sekolah yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kelompok usia sekolah yang lain. Jumlah penduduk usia 13–15 tahun mempunyai persentase yang sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia 16–18 tahun, yakni 28,02% dibandingkan 26,27%.

Untuk menghasilkan hasil BIA yang komprehensif maka penelitian ini hanya akan fokus pada rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) yang berusia sekolah, yakni 7–18 tahun. Hal ini berdasarkan bahwa belanja pendidikan ditujukan khususnya kepada setiap warga negara usia sekolah (7–18 tahun) walaupun pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara seperti diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini selanjutnya menggunakan data pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Klaten berdasarkan Susenas Kor dan Modul di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 yang dilakukan BPS. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 800 rumah tangga dan terdiri dari 2.699 individu. Berdasarkan data dalam Susenas Kor dan Modul tahun 2009, sampel rumah tangga (RT) yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) usia sekolah di Kabupaten Klaten sebanyak 373 rumah tangga dan terdiri dari 1.595 individu. Persentase penduduk usia sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2009 berdasarkan Susenas disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Klaten Berdasarkan Data Susenas Tahun 2009

Usia Sekolah (tahun)	Jumlah ART Usia Sekolah (orang)	Persentase
7 – 12	267	48,55
13 – 15	144	26,18
16 – 18	139	25,27
Total	550	100

Sumber : BPS (2009), telah diolah kembali

Untuk mengetahui distribusi belanja pendidikan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mana maka selanjutnya 373 rumah tangga yang mempunyai anggota usia sekolah dibagi menjadi lima kelompok pendapatan (kuantil). Pembagian ini berdasarkan tingkat pengeluaran per bulan sebagai ukuran pengganti dari tingkat pendapatan rumah tangga per bulan. Urutan

pengelompokan dimulai dari kelompok termiskin ke kelompok terkaya. Jumlah rumah tangga tersebut tidak genap dibagi ke dalam lima kelompok sehingga ada kuantil yang mempunyai anggota lebih banyak daripada kuantil lainnya. Rumah tangga yang berada diantara dua kuantil dimasukkan dalam kuantil yang perbedaan tingkat pendapatannya lebih sedikit dibandingkan dengan kuantil yang lain. Profil tiap kuantil menurut jumlah rumah tangga, jumlah individu, dan pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Profil Kuantil Menurut Tingkat Pendapatan Rumah Tangga yang Memiliki ART
Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Berdasarkan Data Susenas Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Individu (orang)	Pendapatan rata-rata RT (Rp per bulan)
1	75	275	824.794
2	75	303	1.084.031
3	75	319	1.344.533
4	74	346	1.671.244
5	74	342	2.777.190
Total	373	1585	

Sumber : BPS (2009), telah diolah kembali

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah individu semakin bertambah dari kuantil termiskin ke kuantil terkaya. Namun jumlah individu pada kuantil keempat sedikit lebih banyak dari jumlah individu dari kuantil kelima, yakni 346 orang dibandingkan 342 orang. Data ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan sebuah rumah tangga maka semakin banyak anggota rumah tangga yang masuk ke dalam kategori usia sekolah. Biasanya rumah tangga dengan pendapatan rendah mempunyai anak lebih banyak daripada rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi. Pada kolom tingkat pendapatan rumah rata-

rata per bulan ada kenaikan berkisar Rp 300.000 dari kuantil pertama sampai dengan keempat. Namun pada tingkat pendapatan kuantil terkaya terjadi kenaikan tingkat pendapatan yang drastis jika dibandingkan dengan kuantil keempat. Perbedaan pendapatan antara kuantil kelima dengan keempat lebih dari Rp 1.000.000 atau lebih dari tiga kali tingkat kenaikan pendapatan antar kuantil sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan pendapatan yang tinggi antara kelompok masyarakat terkaya dengan kelompok masyarakat berpendapatan dibawahnya di Kabupaten Klaten.

Persentase penduduk usia sekolah pada tiap kuantil menentukan besar kecilnya potensi tiap kuantil untuk mendapatkan manfaat dari belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Tabel 4.5 menampilkan data persentase individu usia sekolah pada masing-masing kuantil tiap kategori usia sekolah.

Tabel 4.5
Persentase Anggota Rumah Tangga Usia Sekolah
tiap Kelompok Pendapatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Kelompok Usia Sekolah			Total (%)
	7 – 12 tahun	13 – 15 tahun	16 – 18 tahun	
1	17,60	20,14	13,67	17,14
2	20,23	15,97	18,71	18,30
3	20,23	21,53	20,86	20,87
4	20,23	22,92	23,02	22,06
5	21,71	19,44	23,74	21,63
Total	100	100	100	100

Sumber : BPS (2009), telah diolah dikembali

Dilihat dari Tabel 4.5 kuantil kelima mempunyai potensi paling tinggi mendapatkan manfaat belanja pendidikan SD Negeri karena persentase penduduk usia 7-12 tahun yang dimilikinya paling besar dibandingkan keempat kuantil lainnya. Sebaliknya potensi kelompok termiskin paling kecil hanya 17,60%. Kuantil keempat mempunyai potensi mendapatkan manfaat dari belanja SMP

Negeri yang paling besar karena persentase penduduk usia 13-15 yang berada di kuantil keempat paling besar yakni 22,92%. Potensi paling kecil mendapatkan belanja SMP Negeri yakni kuantil kedua yang hanya mempunyai 15,97% dari total penduduk usia 13-15 tahun. Potensi mendapatkan belanja sekolah menengah negeri meningkat dari kuantil pertama ke kuantil kelima berarti kelompok terkaya mempunyai potensi paling tinggi mendapatkan manfaat belanja SMA/SMK Negeri dan sebaliknya kelompok termiskin memiliki potensi paling rendah.

4.2.1. Distribusi Manfaat Belanja SD Negeri

Besar kecilnya manfaat belanja SD Negeri yang diterima oleh tiap kelompok pendapatan ditentukan oleh persentase anggota rumah tangganya yang bersekolah di SD Negeri. Tabel 4.6 menyajikan data jumlah manfaat belanja SD Negeri yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan persentase manfaat riil yang diterima disandingkan dengan persentase ART usia 7-12 tahun sebagai potensi yang dimilikinya untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Tabel 4.6
Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SD Negeri menurut
Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Belanja Pendidikan pada SD Negeri (Rp juta)	Persentase Manfaat Riil (%)	Persentase ART Usia 7-12 tahun (%)
1	64.516	20,32	17,60
2	65.786	20,72	20,23
3	63.246	19,92	20,23
4	67.024	21,11	20,23
5	56.928	17,93	21,71
Total	317.500	100	100

Pada Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa kelompok masyarakat termiskin menikmati manfaat sebesar 20,32% dari total belanja SD Negeri di Kabupaten Klaten tahun

2009. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 20,72% dan kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 19,92%. Manfaat belanja SD Negeri terbesar diterima oleh kuantil keempat yakni 21,11%. Kuantil kelima menerima manfaat paling kecil dibandingkan manfaat diterima kuantil lainnya. Kuantil kelima hanya menerima manfaat belanja SD Negeri sebesar 17,93% dari total manfaat belanja SD Negeri.

Manfaat yang diterima oleh kuantil pertama lebih besar daripada potensi yang mereka miliki. Persentase jumlah individu usia 7-12 tahun kuantil pertama sebesar 17,60% seharusnya manfaat maksimal yang diterima juga sebesar 17,60%. Kelompok termiskin dapat menerima manfaat belanja SD Negeri lebih besar daripada potensinya dikarenakan 9,8% dari total murid SD Negeri dari kuantil pertama berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun berdasarkan data Susenas tahun 2009. Persentase jumlah individu usia 7-12 tahun pada kuantil keempat sebesar 20,23% tetapi manfaat belanja SD Negeri yang diterimanya sebesar 21,11%. Tingginya manfaat yang diterima kuantil keempat melebihi potensinya dikarenakan jumlah individu usia 7-12 tahun yang belajar di SD Negeri pada kuantil keempat lebih banyak dibandingkan pada kuantil kedua dan kuantil ketiga yang memiliki potensi yang sama yakni 20,23%. Hal ini dimungkinkan jumlah individu usia 7-12 tahun di kuantil kedua dan kuantil ketiga yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) lebih banyak daripada individu usia 7-12 tahun di kuantil keempat.

Manfaat yang diterima kuantil kelima sebesar 17,93% lebih kecil dari potensinya berdasarkan persentase individu usia sekolah 7-12 tahun yang dimiliki oleh kuantil kelima yakni sebesar 21,71% dari total individu usia 7-12 tahun di Kabupaten Klaten. Hal ini bukan dikarenakan banyaknya individu usia 7-12 tahun di kuantil kelima yang tidak bersekolah di SD tetapi ada rumah tangga di kuantil kelima menyekolahkan anaknya ke SD swasta. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi, rumah tangga di kuantil kelima mampu membiayai anaknya belajar di SD swasta yang biasanya ongkos pendidikan lebih mahal dibandingkan SD Negeri tetapi sarana dan prasarana pendidikannya lebih baik. Berdasarkan data Susenas tahun 2009 persentase individu dari kuantil kelima yang bersekolah di SD swasta cukup signifikan jika dibandingkan total individu dari kuantil kelima yang

bersekolah SD negeri dan swasta, yakni 15%. Selain rumah tangga di kuantil kelima, ada juga rumah tangga di kuantil keempat memilih menyekolahkan anaknya ke SD swasta. Persentase individu di kuantil keempat yang bersekolah di SD swasta hanya 5% dibandingkan dengan total individu dari kuantil keempat yang belajar di SD negeri dan swasta. Tidak ada individu dari kuantil pertama, kuantil kedua, dan kuantil ketiga yang bersekolah di SD swasta.

Salah satu komponen belanja pendidikan SD Negeri di atas adalah dana BOS. Setiap murid SD Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 menerima dana BOS. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali murid. Murid yang berasal dari keluarga miskin menerima dana BOS dalam jumlah yang sama dengan murid yang berasal dari keluarga kaya. Tabel 4.7 menyajikan data distribusi dana BOS SD Negeri pada tiap kelompok pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009.

Tabel 4.7
Distribusi Dana BOS SD Negeri menurut Kelompok Pendapatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Persentase Murid SD Negeri (%)	Dana BOS SD Negeri yang diterima (Rp juta)
1	20,32	8.254
2	20,72	8.416
3	19,92	8.091
4	21,11	8.574
5	17,93	7.283
Total	100	40.618

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kuantil keempat mendapatkan dana BOS SD Negeri paling besar yakni 8.574 juta rupiah. Berikutnya kuantil kedua mendapatkan dana BOS SD Negeri sejumlah 8.416 juta rupiah atau terbesar setelah kuantil keempat. Dana BOS SD Negeri yang diterima oleh kelompok termiskin sebesar 8.254 juta rupiah lebih besar daripada dana BOS SD Negeri

yang diterima oleh kuantil ketiga dan kelima. Kuantil ketiga menikmati dana BOS SD Negeri sebanyak 8.091 juta rupiah, sedangkan kelompok terkaya hanya menerima dana BOS SD Negeri sebanyak 7.283 juta rupiah atau paling kecil dibandingkan kuantil lainnya.

Secara umum dilihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa distribusi manfaat belanja pendidikan SD Negeri termasuk dana BOS SD Negeri terbagi cukup merata diantara kelima kuantil. Hanya kuantil kelima saja yang menerima manfaat yang lebih kecil dari rata-rata yang diterima kuantil lainnya. Kecilnya manfaat belanja SD Negeri yang diterima oleh kelompok terkaya dikarenakan pilihan dari sebagian rumah tangga pada kuantil kelima untuk menyekolahkan anaknya di SD swasta dibandingkan SD negeri. Hasil ini berbeda dengan hasil BIA terhadap belanja pendidikan yang dilakukan beberapa peneliti yang telah disampaikan pada bab II. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa kelompok termiskin menerima paling besar manfaat belanja sekolah dasar daripada kuantil lainnya.

4.2.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SMP Negeri

Distribusi manfaat belanja pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Klaten meningkat dari kuantil pertama sampai dengan kuantil keempat. Dari kuantil keempat ke kuantil kelima, persentase manfaat belanja pendidikan SMP Negeri menurun. Kuantil pertama mendapat manfaat belanja SMP Negeri paling kecil dibandingkan kuantil lainnya yakni 14,44%. Manfaat yang diterima kuantil kedua lebih tinggi dibandingkan kuantil pertama yakni 16,67%. Kuantil ketiga menerima manfaat belanja pendidikan SMP Negeri lebih besar daripada kuantil kedua yakni 23,33%. Manfaat belanja pendidikan SMP Negeri paling besar diterima oleh kuantil keempat dibandingkan dengan kuantil lainnya yakni 26,67%. Manfaat belanja SMP Negeri yang diterima oleh kelompok terkaya lebih rendah daripada manfaat yang diterima oleh kuantil ketiga dan kuantil keempat. Kelompok terkaya menikmati manfaat belanja pendidikan SMP Negeri sebesar 18,89%. Tabel 4.8 menyajikan data jumlah manfaat belanja SMP Negeri yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan persentase manfaat riil yang diterima yang

disandingkan dengan persentase ART usia 13-15 tahun sebagai potensi yang dimilikinya.

Tabel 4.8
Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SMP Negeri Menurut
Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Belanja Pendidikan pada SMP Negeri (Rp juta)	Manfaat Riil (%)	Persentase ART Usia 13-15 tahun (%)
1	19.019	14,44	20,14
2	21.956	16,67	15,97
3	30.729	23,33	21,53
4	35.128	26,67	22,92
5	24.881	18,89	19,44
Total	131.713	100	100

Dilihat dari Tabel 4.8 persentase manfaat yang diterima oleh kuantil pertama tidak sebanding dengan potensi yang dimilikinya. Persentase individu usia 13–15 tahun yang terdapat dalam rumah tangga di kuantil pertama yakni 20,14% tetapi manfaat yang diterima hanya sebesar 14,44%. Hal ini disebabkan karena ada individu usia 13–15 tahun di kuantil pertama yang tidak dapat bersekolah ke jenjang pendidikan SMP dengan berbagai alasan, seperti tidak ada biaya dan merasa pendidikannya sudah cukup. Berdasarkan data Susenas tahun 2009, 10,34% dari total individu usia 13-15 tahun di kelompok termiskin mempunyai kendala biaya sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pendidikan SMP. Kasus putus sekolah pada individu usia 13–15 tahun juga terjadi pada kuantil kedua dan kuantil ketiga tetapi persentase cenderung menurun daripada persentase pada kuantil termiskin. Alasan biaya sebagai faktor putus sekolah tidak ditemukan lagi pada kuantil kedua dan ketiga. Pada kuantil keempat dan kelima tidak ada kasus putus sekolah pada individu usia 13-15 tahun.

Persentase individu usia 13-15 tahun yang dimiliki kuantil kelima sebesar 19,44% terhadap total individu usia 13-15 tahun, tetapi manfaat yang diterimanya

lebih kecil yakni 18,89%. Hal ini bukan karena ada individu usia 13–15 tahun di kuantil kelima tidak melanjutkan studi ke SMP tetapi karena sebagian individu usia 13–15 tahun di kuantil kelima sudah sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA/SMK. Berdasarkan data Susenas tahun 2009 persentase individu usia 13–15 tahun di kuantil kelima yang sudah studi di sekolah menengah terhadap total individu usia 13–15 tahun di kuantil kelima sebanyak 39,29%. Besarnya persentase individu usia 13-15 tahun dari rumah tangga kelompok terkaya yang sudah studi di sekolah menengah karena semua individu dari kelompok umur tersebut yang lulus SMP langsung melanjutkan studi ke sekolah menengah. Berhubung Susenas Kor dan Modul tahun 2009 dilakukan pada bulan Juli 2009 maka mereka terdata sudah sebagai siswa sekolah menengah walaupun mereka masih berusia 15 tahun.

Pada tahun 2009 setiap murid SMP Negeri di Kabupaten Klaten menerima dana BOS dalam jumlah yang sama yakni 570.000, tanpa melihat kemampuan ekonomi orang tua atau wali murid. Jumlah dana BOS SMP Negeri pada tiap kelompok pendapatan di Kabupaten Klaten tahun 2009 ditampilkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Distribusi Dana BOS SMP Negeri Menurut Kelompok Pendapatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Persentase Murid SMP Negeri (%)	Dana BOS SMP Negeri yang diterima (Rp juta)
1	14,44	3.375
2	16,67	3.897
3	23,33	5.454
4	26,67	6.235
5	18,89	4.416
Total	100	23.377

Dilihat dari Tabel 4.9 kelompok termiskin menikmati dana BOS SMP Negeri paling kecil dibandingkan kuantil lainnya, yaitu 3.375 juta rupiah. Kuantil kedua menikmati dana BOS SMP Negeri sebanyak 3.897 juta rupiah dan kuantil ketiga menikmati dana BOS SMP Negeri 5.454 juta rupiah. Dana BOS SMP Negeri paling besar diterima oleh kuantil keempat yakni 6.235 juta rupiah. Kelompok terkaya menikmati dana BOS SMP Negeri sejumlah 4.416 juta rupiah atau lebih kecil dari kuantil ketiga dan kuantil keempat. Data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar BOS SMP Negeri dinikmati oleh kelompok pendapatan menengah ke atas.

Secara umum distribusi manfaat belanja pendidikan SMP Negeri termasuk dana BOS SMP Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 bersifat regresif dilihat dari semakin meningkatnya persentase manfaat yang diterima dari kuantil termiskin ke kuantil terkaya. Belanja ini bersifat regresif terutama jika dilihat pada kuantil termiskin yang hanya menerima manfaat sebesar 14,44% dari total manfaat belanja SMP Negeri walaupun persentase individu usia 13-15 tahun di kuantil pertama sebesar 20,14%. Kuantil ketiga dan kuantil keempat yang tingkat kesejahteraannya lebih baik menerima manfaat sebanyak 23,33% dan 26,67%. Kecilnya manfaat yang diterima oleh kuantil pertama disebabkan salah satunya karena mereka tidak mempunyai biaya untuk mengakses layanan pendidikan ini. Angka 10,34% dari total individu usia 13–15 tahun dalam kuantil pertama yang tidak dapat menikmati layanan pendidikan SMP karena kendala biaya merupakan jumlah yang signifikan dikaitkan dengan kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan dasar (SD/SMP) untuk semua penduduk usia 7-15 tahun dan kebijakan BOS SMP untuk membebaskan biaya sekolah untuk semua murid. Ada kemungkinan masih ada pungutan biaya di SMP Negeri sehingga ada penduduk usia 13-15 tahun dari kelompok pendapatan rendah tidak dapat mengakses layanan pendidikan SMP di Kabupaten Klaten. Hal ini tentu saja menjadi catatan buat pemerintah khususnya Pemkab Klaten untuk mengupayakan lebih banyak individu usia 13-15 tahun khususnya dari kelompok termiskin dapat mengakses layanan pendidikan SMP Negeri sebagai wujud tugas pemerintah menyediakan pendidikan dasar untuk setiap warga negara usia 7-15 tahun.

4.2.3. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SMA/SMK Negeri

Manfaat yang diterima masing-masing kelompok pendapatan atas belanja pendidikan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 ditentukan oleh jumlah anggota rumah tangga mereka yang bersekolah di SMA/SMK Negeri pada tahun 2009. Tabel 4.10 menyajikan data jumlah manfaat belanja SMA/SMK Negeri yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan persentase manfaat riil yang diterima yang disandingkan dengan persentase ART usia 16-18 tahun sebagai potensi yang dimilikinya.

Tabel 4.10
Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan pada SMA/SMK Negeri Menurut
Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Belanja Pendidikan pada SMA/SMK Negeri (Rp juta)	Manfaat Riil (%)	Persentase ART Usia 16-18 tahun (%)
1	6.856	10,94	13,67
2	5.878	9,38	18,71
3	9.789	15,62	20,86
4	22.524	35,94	23,02
5	17.623	28,12	23,74
Total	62.670	100	100

Manfaat belanja SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten juga terdistribusi secara regresif seperti yang digambarkan dalam Tabel 4.10. Kuantil termiskin dan kuantil kedua mendapatkan persentase manfaat lebih sedikit dibandingkan kuantil ketiga, kuantil keempat, dan kuantil kelima. Kuantil pertama mendapatkan manfaat sebanyak 10,94% dan kuantil kedua mendapatkan manfaat sebanyak 9,38%. Mayoritas manfaat belanja pendidikan sekolah menengah negeri dinikmati oleh tiga kuantil teratas, dengan perincian sebagai berikut kuantil ketiga menerima manfaat sebanyak 15,62%, kuantil keempat mendapat manfaat sebesar 35,94%, dan kuantil kelima menikmati manfaat sebanyak 28,12%. Kuantil keempat dapat

memperoleh paling besar manfaat belanja SMA/SMK Negeri karena tidak ada kasus putus sekolah pada tingkat SMA/SMK di kuantil ini berdasarkan data Susenas tahun 2009. Namun sekitar 15,62% dari total individu usia 16-18 tahun di kuantil ini sudah lulus SMA/SMK tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena tidak mempunyai biaya dan bekerja. Sebaliknya kelompok terkaya yang menerima manfaat lebih sedikit daripada kuantil keempat tetapi mereka mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. 12,5% dari total individu usia 16-18 tahun di kuantil kelima mampu melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan masih tinggi dalam masyarakat Kabupaten Klaten seperti yang disajikan dalam Tabel 4.5. Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan dari kelompok terkaya sebesar Rp 2.777.190, sedangkan pendapatan rata-rata per bulan kuantil keempat hanya Rp 1.671.244. Kondisi ini juga layak menjadi perhatian pemerintah supaya ada program untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat yang berpendapatan di bawah kelompok terkaya di Kabupaten Klaten pada layanan pendidikan perguruan tinggi. Mereka juga perlu mengenyam layanan pendidikan perguruan tinggi yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari usaha mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan potensi pendapatannya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni transfer langsung dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan transfer tidak langsung dalam bentuk peningkatan potensi pendapatan.

Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa kuantil pertama memiliki persentase individu usia 16–18 tahun paling rendah dibandingkan kuantil yang lain, yakni 13,67% sehingga manfaat belanja pendidikan SMA/SMK yang diterimanya juga kecil yakni 10,94%. Selain itu, alasan biaya menjadi faktor utama bagi individu usia 16-18 tahun tidak bisa mengakses layanan pendidikan SMA/SMK sehingga mereka tidak dapat menikmati manfaat belanja pendidikan ini. Berdasarkan data Susenas tahun 2009 persentase alasan biaya sebagai latar belakang individu usia 16–18 tahun di kelompok termiskin yang tidak dapat bersekolah di jenjang pendidikan menengah adalah 36,84%. Begitu juga di kuantil kedua, alasan biaya juga menjadi latar belakang utama individu usia 16–18 tahun tidak dapat

bersekolah ke sekolah menengah. 26,92% dari total individu usia 16-18 tahun di kuantil kedua terbentur faktor biaya sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pendidikan menengah yang disediakan pemerintah.

Faktor biaya sebagai penyebab individu tidak menikmati manfaat belanja SMA/SMK pada kuantil pertama dan kuantil kedua di atas menjadi penghalang kelompok miskin untuk menikmati layanan pendidikan menengah yang disediakan pemerintah. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari belanja pendidikan yang dilakukan pemerintah. Kelompok termiskin merupakan sasaran utama dari belanja pendidikan yang dilakukan pemerintah supaya potensi pendapatan individu yang mendapatkan pendidikan dapat meningkat. Mereka diharapkan masuk pasar tenaga kerja dan mendapat gaji yang layak sesuai dengan kualitas pendidikannya sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Semakin sedikit kelompok miskin dapat mengakses manfaat belanja pendidikan menengah yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan di SMA/SMK Negeri maka tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui belanja pendidikan di Kabupaten Klaten masih sulit terwujud.

Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Klaten dapat dilihat dengan masih terbatasnya jumlah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten, yakni hanya 26 buah. Keterbatasan pemerintah tersebut menjadi ruang untuk pihak swasta berpartisipasi dalam sektor pendidikan di kabupaten Klaten dengan mendirikan SMA/SMK Swasta. Jumlah SMA/SMK swasta pada tahun 2009 sebanyak 57 buah yang terdiri dari 15 SMA dan 42 SMK di Kabupaten Klaten. Penduduk Kabupaten Klaten memanfaatkan keberadaan SMA/SMK swasta dengan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tersebut.

Berdasarkan data Susenas tahun 2009 mayoritas murid SMA/SMK swasta berasal dari kuantil ketiga, kuantil keempat dan kuantil kelima. Individu dari kuantil ketiga menduduki peringkat pertama dalam jumlah murid SMA/ SMK swasta, yakni dengan persentase sebesar 27,91%. Persentase terbanyak berikut ada pada kuantil kelima dengan persentase murid sebanyak 25,58% dan persentase murid dari kuantil keempat sebanyak 23,35%. Total murid SMA/SMK swasta dari tiga kuantil teratas sebesar 76,84%. Sisanya yakni sebesar 23,16% dari

total jumlah murid SMA/SMK swasta berasal dari dua kuantil terbawah, dengan perincian sebagai berikut kuantil pertama sebanyak 6,98% dan kuantil kedua sebanyak 16,28%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang mempunyai pendapatan menengah ke atas di Kabupaten Klaten lebih mampu menyekolahkan anaknya ke SMA/SMK swasta. Dengan demikian keterlibatan pihak swasta dalam menyelenggarakan pendidikan SMA/SMK belum mampu menjawab kesulitan kelompok masyarakat pendapatan rendah untuk mengenyam pendidikan menengah.

4.2.4. Distribusi Total Manfaat Belanja Pendidikan

Persentase manfaat belanja pendidikan yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Klaten meningkat dari kelompok termiskin ke kelompok terkaya maka belanja pendidikan di Kabupaten Klaten masih bersifat regresif. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten dinikmati oleh kelompok pendapatan menengah ke atas.

Tabel 4.11
Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan
dan Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok	SD Negeri		SMP Negeri		SMA/SMK Negeri		Total	
	Manfaat Belanja Pendidikan (Rp juta)	%						
1	64.516	20,32	19.019	14,44	6.856	10,94	90.391	17,67
2	65.786	20,72	21.956	16,67	5.878	9,38	93.260	18,23
3	63.246	19,92	30.729	23,33	9.789	15,62	103.764	20,29
4	67.024	21,11	35.128	26,67	22.524	35,94	124.676	24,37
5	56.928	17,93	24.881	18,89	17.623	28,12	99.432	19,44
Total	317.500	100	131.713	100	62.670	100	511.523	100

Distribusi seperti yang digambarkan pada Tabel 4.11 tidak bersifat progresif yang berpihak pada kelompok miskin sebagai sasaran utama belanja pendidikan. Kelompok termiskin menerima paling sedikit manfaat belanja pendidikan, yakni hanya 90.391 juta rupiah (17,67%). Kuantil kedua menerima manfaat sebanyak 93.260 juta rupiah (18,23%), kuantil ketiga menerima manfaat sebanyak 103.764 juta rupiah (20,29%), dan kuantil keempat menerima manfaat sebanyak 124.676 juta rupiah (24,37%). Total manfaat hanya turun dari kuantil keempat ke kuantil kelima. Kelompok terkaya menerima manfaat sebesar 99.432 juta rupiah (19,44%). Hal ini disebabkan rumah tangga dari kelompok kaya mempunyai pendapatan tinggi sehingga mereka bisa mengakses layanan pendidikan sekolah swasta sebagai alternatif dari sekolah negeri seperti yang terjadi pada tingkat pendidikan SD. 15% dari total anggota rumah tangga yang bersekolah di SD pada kelompok terkaya menuntut ilmu di SD swasta seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masih kecilnya persentase manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten yang diterima oleh kelompok miskin selanjutnya menjadi pekerjaan utama pemerintah khususnya Pemkab Klaten yang harus segera dipecahkan sehingga belanja pendidikan ke depan lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin.

4.3. Proporsi Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan

Untuk menilai apakah belanja pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 benar-benar bersifat regresif perlu dipertimbangkan mengenai persentase belanja yang diterima masing-masing kuantil dengan total pendapatan rumah tangga masing-masing kuantil. Belanja pendidikan yang diterima adalah total murid tiap tingkat pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK Negeri) pada masing-masing kuantil dikalikan dengan manfaat belanja per murid tiap tingkat pendidikan. Total pendapatan rumah tangga setahun adalah jumlah pendapatan per bulan dari seluruh rumah tangga masing-masing kuantil dikalikan 12 bulan. Hal ini untuk menunjukkan beberapa persen masing-masing kuantil menerima manfaat belanja pendidikan jika dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangganya.

Persentase manfaat belanja SD Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga tiap kuantil selama setahun di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 bersifat

progresif. Persentase manfaat yang diterima kelompok termiskin paling tinggi dibandingkan kuantil lainnya dan nilainya menurun terus dari kuantil pertama ke kuantil kelima. Kelompok termiskin menikmati manfaat belanja SD Negeri sebesar 21,49% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Kuantil kedua menerima manfaat sebanyak 16,66% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun dan kuantil ketiga menerima manfaat sebanyak 12,9% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Manfaat yang diterima kuantil keempat sebesar 11,12% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Kelompok terkaya menikmati paling sedikit manfaat belanja SD Negeri yakni hanya sebesar 5,68% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Hasil ini berbeda dengan distribusi manfaat belanja SD Negeri dilihat dari nilai nominalnya yang terbagi hampir merata di kelima kuantil atau tidak bersifat progresif. Persentase manfaat belanja SD Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga tiap kuantil selama setahun di Kabupaten Klaten tahun 2009 disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SD Negeri terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Manfaat Belanja Pendidikan (Rp juta)	Total Pendapatan Rumah Tangga setahun (Rp juta)	Proporsi Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan RT (%)
1	159	742	21,49
2	162	976	16,66
3	156	1.210	12,9
4	165	1.484	11,12
5	140	2.466	5,68

Pada belanja pendidikan SMP Negeri kelompok termiskin masih mendapatkan persentase manfaat belanja terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun paling tinggi dibandingkan kuantil lainnya. Kelompok termiskin

mendapatkan manfaat sebesar 5,66% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Proporsi manfaat belanja pendidikan SMP terhadap total pendapatan rumah tangga setahun pada kuantil kedua, kuantil ketiga, dan keempat juga berkisar 5% sama seperti kuantil pertama. Kuantil ketiga mendapatkan manfaat sebesar 5,62% dari total pendapatan rumah tangganya, kuantil keempat mendapatkan manfaat sebesar 5,26% dari total pendapatan rumah tangganya, dan kuantil kedua mendapatkan manfaat 5,02% dari total pendapatan rumah tangganya. Manfaat belanja pendidikan SMP yang kelompok terkaya paling kecil dibandingkan keempat kuantil lainnya. Kelompok terkaya hanya menerima manfaat belanja SMP Negeri sebesar 2,23% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Persentase manfaat belanja pendidikan SMP Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga setahun pada kuantil pertama sampai kuantil kuantil keempat hampir sama besarnya seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.13. Hasil ini berbeda dengan distribusi manfaat belanja SMP Negeri dilihat dari nilai nominal yang bersifat regresif.

Tabel 4.13
Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SMP Negeri terhadap
Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Manfaat Belanja Pendidikan per tahun (Rp juta)	Total Pendapatan Rumah Tangga setahun (Rp juta)	Proporsi Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan RT (%)
1	42	742	5,66
2	49	976	5.02
3	68	1.210	5,62
4	78	1.484	5,26
5	55	2.466	2,23

Persentase manfaat belanja SMA/SMK Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun paling tinggi diterima oleh kuantil keempat. Kuantil

keempat menerima manfaat sebesar 4,72% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. tingkat manfaat yang diterima oleh kuantil keempat berbeda jauh dengan tingkat manfaat yang diterima kuantil lainnya. Kelompok termiskin menerima manfaat terbesar setelah kuantil keempat tetapi manfaat yang diterima hanya 2,83% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 2,56% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun dan kuantil kelima menerima manfaat sebesar 2,23% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Persentase manfaat belanja SMA/SMK Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun paling kecil pada kuantil kedua yakni 1,84% seperti yang disajikan pada Tabel 4.14. Hasil ini hampir sama dengan distribusi manfaat belanja SMA/SMK dilihat dari nilai nominalnya bahwa kuantil keempat menerima paling besar manfaat belanja ini.

Tabel 4.14
Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan SMA/SMK Negeri terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Manfaat Belanja Pendidikan (Rp juta)	Total Pendapatan Rumah Tangga setahun (Rp juta)	Proporsi Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan RT (%)
1	21	742	2,83
2	18	976	1,84
3	31	1.210	2,56
4	70	1.484	4,72
5	55	2.466	2,23

Evaluasi distribusi manfaat total belanja pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 apakah sudah bersifat progresif atau regresif dapat dilihat juga dari persentase manfaat terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun tiap kuantil. Hasil penghitungan persentase manfaat terhadap total pendapatan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan hasil distribusi manfaat belanja

dilihat dari nilai nominalnya. Persentase total manfaat belanja pendidikan terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun tiap kuantil di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 bersifat progresif. Kelompok termiskin menerima manfaat belanja sebesar 29,92% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Manfaat yang diterima kuantil pertama merupakan manfaat terbesar dibandingkan kuantil lainnya. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 23,46% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 21,07% dari total pendapatan rumah tangganya setahun berbeda sedikit dengan persentase yang diterima kuantil keempat yakni 21,09% dari total pendapatan rumah tangganya setahun. Kelompok terkaya menikmati manfaat paling kecil yakni 10,14% dari total pendapatan. Hasil penghitungan ini berbeda dengan hasil distribusi manfaat belanja pendidikan menurut nilai nominalnya yang menyimpulkan bahwa belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 bersifat regresif. Persentase manfaat belanja pendidikan terhadap pendapatan rumah tangga setahun tiap kelompok pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Persentase Total Manfaat Belanja Pendidikan terhadap
Total Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Pendapatan (termiskin ke terkaya)	Total Manfaat Belanja Pendidikan/tahun (Rp juta)	Total Pendapatan Rumah Tangga se-tahun (Rp juta)	Proporsi Manfaat Belanja Pendidikan terhadap Total Pendapatan RT (%)
1	222	742	29,92
2	229	976	23,46
3	255	1.210	21,07
4	313	1.484	21,09
5	250	2.466	10,14

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat belanja untuk SD Negeri termasuk dana BOS SD Negeri di Kabupaten Klaten tahun 2009 terdistribusikan hampir merata dilihat dari nilai nominalnya bagi seluruh rumah tangga pada tiap kelompok pendapatan. Kuantil pertama mendapat 20,32%, kuantil kedua mendapat 20,72%, kuantil ketiga mendapat 19,92 persen, dan kuantil keempat mendapat 21,11%. Hanya pada kelompok terkaya, persentase manfaat belanja SD Negeri berbeda agak jauh dibandingkan keempat kuantil lainnya, yakni 17,93%. Dihat dari proporsi manfaat belanja SD Negeri terhadap pendapatan rumah tangga tiap kuantil selama setahun, belanja pendidikan SD Negeri bersifat progresif. Kelompok miskin menerima persentase manfaat paling tinggi yakni 21,59% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun dibandingkan persentase manfaat yang didapat oleh kuantil lainnya.
2. Belanja pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Klaten tahun 2009 bersifat regresif dilihat dari nilai nominalnya. Kelompok termiskin menerima paling kecil manfaat dibandingkan kelompok pendapatan di atasnya. Padahal persentase individu usia 13-15 tahun dalam kuantil pertama lebih besar daripada persentase individu seusia di kuantil kedua jika dilihat dari total individu usia 13-15 tahun di Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan sebagian rumah tangga dalam kelompok termiskin tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya tersebut ke jenjang pendidikan SMP. Berdasarkan data Susenas tahun 2009, 10,34% dari total individu usia 13-15 tahun di kelompok termiskin memiliki kendala biaya sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan SMP. Angka putus sekolah pada individu 13-15 tahun pada kelompok termiskin tersebut merupakan bukti ketidakberhasilan pemerintah khususnya Pemkab Klaten untuk memenuhi kewajibannya, yakni memberikan pendidikan dasar (SD/SMP) kepada setiap warga negara yang

berusia 7-15 tahun seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 tahun 2003. Kebijakan pemerintah memberikan dana BOS kepada semua murid SMP belum berhasil membantu setiap penduduk Kabupaten Klaten usia 13-15 tahun dari kelompok berpendapatan rendah dapat bersekolah di SMP khususnya SMP Negeri.

Dilihat dari proporsi manfaat belanja pendidikan SMP Negeri terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun tiap kuantil, distribusi manfaat belanja pendidikan yang diterima kuantil pertama sampai kuantil keempat hampir sama besar. Kelompok termiskin mendapatkan manfaat sebesar 5,66%, kuantil kedua mendapatkan manfaat sebesar 5,02%, kuantil ketiga mendapatkan manfaat sebesar 5,62%, dan kuantil keempat mendapatkan manfaat sebesar 5,26% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun.

3. Persentase individu usia 16-18 tahun meningkat dari kelompok termiskin ke kelompok terkaya. Begitu juga persentase manfaat belanja SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten yang meningkat dari kelompok termiskin ke kelompok terkaya. Mayoritas manfaat belanja ini diterima oleh tiga kuantil teratas, yakni kuantil keempat menikmati manfaat sebesar 35,94%, kuantil kelima menikmati manfaat sebesar 28,12%, dan kuantil ketiga menikmati manfaat sebesar 15,62%. Manfaat terbesar belanja SMA/SMK Negeri diterima oleh kuantil keempat. Hasil ini sama seperti distribusi manfaat dilihat persentasenya terhadap total pendapatan rumah tangga selama setahun, kuantil keempat menerima manfaat paling tinggi dibandingkan kuantil lainnya yakni 4,72% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Kelompok termiskin hanya mendapat 10,94% dan kuantil kedua mendapat 9,38% dari total manfaat belanja SMA/SMK Negeri. Kecilnya manfaat yang diterima kuantil pertama dan kedua bukan disebabkan oleh kecilnya persentase individu usia 16-18 tahun dalam kelompoknya, melainkan banyaknya individu dari kedua kuantil tersebut yang tidak bisa mengakses pendidikan SMA/SMK yang disediakan oleh pemerintah karena kendala biaya. Berdasarkan data Susenas tahun 2009, 36,84% dari total individu usia 16-18 tahun dalam kelompok termiskin tidak mempunyai biaya sehingga mereka tidak bisa sekolah di SMA/SMK dan

persentase dalam kasus serupa di kuantil kedua sebanyak 26,92%. Kecilnya manfaat belanja SMA/SMK Negeri yang diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertolak belakang dengan tujuan belanja pendidikan pemerintah yakni pemerataan pendapatan melalui peningkatan potensi pendapatan kelompok termiskin dengan menyediakan pendidikan kepada kelompok miskin.

4. Khususnya untuk sekolah menengah, pemerintah belum dapat menyediakan layanan pendidikan yang memadai, seperti jumlah SMA dan SMK Negeri. Pada tahun 2009 jumlah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten masih terbatas yaitu 26 sekolah. Pihak swasta di Kabupaten Klaten berpartisipasi menyediakan layanan pendidikan menengah dalam bentuk SMA/SMK sejumlah 57 sekolah. Tingkat persentase partisipasi tiap kelompok pendapatan meningkat dari kuantil termiskin ke terkaya dalam mengakses layanan SMA/SMK swasta. Berdasarkan data Susenas tahun 2009 hanya 6,98% dari total individu usia 16-18 tahun dari kelompok termiskin yang dapat mengakses sekolah yang disediakan pihak swasta ini. Partisipasi swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMA/SMK belum menjawab kesulitan kelompok berpendapatan rendah untuk mengakses pendidikan menengah.
5. Jika dilihat dari total nominal manfaat yang diterima masing-masing kelompok pendapatan, belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 bersifat regresif. Kelompok termiskin menerima paling sedikit manfaat belanja tersebut dibandingkan dengan kelompok pendapatan di atasnya. Total belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri di Kabupaten Klaten tahun 2009 sebesar Rp 511.844.900.402. Dari total belanja tersebut, kelompok termiskin hanya menikmati sebanyak 17,66%. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 18,28%, kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 20,27%, dan kuantil keempat memperoleh manfaat paling besar yakni 24,36%. Kelompok terkaya memperoleh manfaat lebih sedikit dibandingkan kuantil ketiga dan kuantil keempat, yaitu sebesar 19,42%. Hal ini bukan disebabkan kelompok terkaya tidak dapat mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah melainkan rumah tangga dari kelompok terkaya dapat mengakses sekolah

swasta sebagai alternatif sekolah negeri karena mereka mampu secara ekonomi untuk menanggung ongkos pendidikan yang lebih mahal di sekolah swasta seperti yang terjadi pada tingkat pendidikan SD. 15% dari total murid SD dari kelompok terkaya yang bersekolah di SD swasta.

6. Jika dilihat dari persentase manfaat terhadap total pendapatan rumah tangga setahun pada tiap kuantil maka belanja pendidikan di Kabupaten Klaten bersifat progresif. Manfaat yang diterima kuantil pertama sebesar 29,92% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun. Persentase manfaat yang diterima kuantil pertama merupakan manfaat terbesar dibandingkan kuantil lainnya. Kuantil kedua menerima manfaat sebesar 23,46% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun, kuantil ketiga menerima manfaat sebesar 21,07% dari total pendapatan rumah tangganya setahun, dan kuantil keempat menerima manfaat sebesar 21,09% dari total pendapatan rumah tangganya setahun. Kelompok terkaya menikmati manfaat paling kecil yakni 10,14% dari total pendapatan rumah tangganya setahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sudah memberikan persentase belanja pendidikan yang berpihak kepada kelompok miskin karena proporsi manfaat terhadap total pendapatan rumah tangga pada kuantil pertama paling tinggi dibandingkan kuantil lainnya.

5.2. Rekomendasi

Berpijak pada kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka putus sekolah pada individu usia 13-15 tahun di kelompok termiskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 merupakan bukti kegagalan pemerintah khususnya Pemkab Klaten dalam menyediakan pendidikan dasar bagi setiap warga negara usia 13-15 tahun. Hal ini ironis karena semua murid SMP baik sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Klaten berhak menerima BOS, terlebih kebijakan ini bertujuan membebaskan semua siswa SMP Negeri dari beban biaya operasi sekolah. Untuk itu pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan diawasi oleh DPRD II Kabupaten

Klaten harus memastikan bahwa SMP Negeri tidak melakukan pungutan yang membebani murid karena biaya operasi sekolah sudah didanai oleh BOS. Langkah ini diharapkan dapat membantu penduduk usia 13-15 tahun dari kelompok miskin dapat mengakses layanan pendidikan SMP Negeri. Untuk mewujudkan belanja pendidikan SMP Negeri lebih tepat sasaran kepada kelompok miskin maka pemerintah dan DPR perlu juga melakukan langkah meninjau kebijakan pemberian BOS SMP kepada semua murid tanpa mempertimbangkan status ekonomi orang tua atau wali muridnya. Dengan kebijakan tersebut diharapkan alokasi BOS SMP untuk siswa dari keluarga mampu dapat dialihkan untuk meningkatkan bantuan pendidikan kepada individu usia 13-15 tahun dari kelompok miskin sehingga lebih banyak dari mereka yang dapat mengenyam pendidikan SMP.

2. Tingginya tingkat kasus putus sekolah pada individu usia 16-18 tahun pada kelompok berpendapatan rendah (kuantil pertama dan kedua) di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 merupakan kegagalan pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan SMA/SMK kepada kelompok miskin. Kelompok berpendapatan rendah menerima manfaat belanja ini lebih rendah daripada kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Untuk itu program beasiswa pendidikan sekolah menengah kepada siswa yang lulus SMP atau sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu diperbanyak jumlahnya. Beasiswa tersebut bukan hanya dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Tengah saja tetapi juga dari Pemkab Klaten yang didukung oleh DPRD Kabupaten Klaten. Jika kapasitas sekolah menengah negeri kurang maka beasiswa tersebut dapat dialokasikan kepada para siswa yang melanjutkan atau sedang studi di SMA/SMK swasta sehingga jumlah murid dari kelompok termiskin di SMA/SMK swasta dapat meningkat.
3. Dilihat dari persentase manfaat belanja terhadap total pendapatan rumah tangga setahun pada tiap kuantil maka belanja pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2009 dapat dinilai progresif. Tetapi dilihat distribusi nilai nominal manfaat pada tiap kuantil, belanja pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 masih bersifat regresif. Untuk itu para pemegang kebijakan, yakni Pemerintah

Pusat, DPR, Pemkab Klaten, dan DPRD Kabupaten Klaten perlu meningkatkan belanja pendidikan untuk kelompok termiskin dari nilai nominal manfaat yang didistribusikan sekaligus sambil meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan pendidikan yang disediakan pemerintah khususnya SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri. Dengan kebijakan tersebut diharapkan kelompok termiskin dapat menikmati sebagian besar manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Klaten baik dilihat dari nominal manfaat maupun persentase manfaat terhadap total pendapatan rumah tangga setahun.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU DAN JURNAL

Badan Pusat Statistik (2010), "Statistik Pendidikan 2009", Badan Pusat Statistik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2009), "Profil Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2009", Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2010), "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2009", Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Demery, Lionel (2000), "*Benefit Incidence : A Practitioner's Guide*", *Poverty and Social Development Group Africa Region The World Bank*, http://info.worldbank.org/etools/docs/library/244451/day5Benefit%20Incidence%20A%20Practitioners%20Guide_Demery.pdf.

Davoodi, Hamid R et al (2003), "*How Useful Are Benefit Incidence Analyses of Public Education and Health Spending?*", International Monetary Fund, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03227.pdf>.

Juswanto, Wawan (2010), "*Distribution of Government Expenditure and Demand for Education Services : The Case of Indonesia*", <http://www.ecomod.org/files/papers/875.pdf>.

Lanjauw, Peter et al (2001), "*Poverty, Education, and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*", *The World Bank*, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/01/18/000094946_02010804031952/Rendered/PDF/multi0page.pdf.

Manasan, Rosario G et al (2007), "*Benefit Incidence of Public Spending on Education in the Philippines*", Philippine Institute for Development Studies, www.eaber.org/intranet/documents/26/944/PIDS_Manasan_07_2.pdf.

Rozen, Harvey S (2002), "*Public Finance*", 6th Edition, Mc Graw-Hill Irwin.

Stiglitz, Joseph E (2000), "*The Public Sector*", 3rd Edition, W.W. Norton and Company.

Universitas Indonesia (2008), "Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Universitas Indonesia.

Utami, Zamrud (2010), "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bekasi", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FE UI, tidak dipublikasikan.

Walle, Dominique van de (1992), "*The Distribution of the Benefits from Social Services in Indonesia 1978-87*", *The World Bank*, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1992/03/01/000009265_3961002162824/Rendered/PDF/multi_page.pdf.

World Bank (2008), "Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia : Sebuah Kajian Pengeluaran Publik dan Pengelolaan Keuangan pada Tingkat Daerah", *The World Bank*, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/02/20/000333038_20090220004238/Rendered/PDF/475140ESW01WHI1ct0Ed u0PER020090Indo.pdf.

II. PERATURAN DAN PRESENTASI

Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI/2008 tentang Alokasi Anggaran Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 17 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun Anggaran 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun Anggaran 2009.

Presentasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009 oleh Suyanto (2009), Kementerian Pendidikan Nasional

Presentasi Mata Kuliah Ekonomi Keuangan Publik oleh Hania Rahma (2010), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Presentasi Mata Kuliah Teknik Penyusunan Proposal Tesis oleh Hania Rahma (2010), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Klaten TA 2009

No	Keterangan	Jumlah	Persen
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1	Pendapatan Pajak Daerah	18.921.063.434	1,92%
2	Pendapatan Restribusi Daerah	11.034.755.597	1,12%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan			
3	Daerah Yang Dipisahkan	4.101.047.114	0,42%
4	Lain-lain PAD yang sah	12.547.010.785	1,27%
sub total		46.603.876.930	
Pendapatan Transfer dari Pusat			
1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.281.761.514	3,89%
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.604.081.220	0,47%
3	Dana Alokasi Umum	726.192.262.000	73,76%
4	Dana Alokasi Khusus	71.995.000.000	7,31%
5	Dana Penyesuaian	36.252.417.000	3,68%
Pendapatan Transfer dari Provinsi			
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	45.589.852.560	4,63%
sub total		922.915.374.294	
Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1	Pendapatan Lainnya	15.051.185.780	1,53%
Total Pendapatan		984.570.437.004	100,00%
Belanja			
1	Dinas Pendidikan	528.167.952.317	53,83%
2	Dinas Kesehatan	70.338.891.624	7,17%
3	Dinas Pekerjaan Umum	69.508.427.711	7,08%
	Dinas Pertanian	19.113.567.920	1,95%
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.062.222.970	0,62%
5	Sekretariat Daerah	20.522.533.129	2,09%
6	Dinas Perhubungan	4.039.314.600	0,41%
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan		
7	Perlindungan Masyarakat	3.326.003.892	0,34%
8	Satuan Polisi PP	2.319.838.449	0,24%
9	Sekretariat DPRD	8.979.720.789	0,92%
10	Kantor Pelayanan Terpadu	1.556.915.096	0,16%
11	Badan Kepegawaian Daerah	6.216.553.368	0,63%
12	Badan Lingkungan Hidup	2.307.502.601	0,24%
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.186.829.601	0,32%
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan		
14	Keluarga Berencana	3.013.738.407	0,31%
15	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi	4.635.659.449	0,47%

No	Keterangan	Jumlah	Persen
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	13.568.525.514	1,38%
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11.527.031.948	1,17%
18	DPRD	5.954.217.531	0,61%
19	Bupati dan Wakil Bupati	559.688.536	0,06%
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	151.821.033.671	15,47%
21	Inspektorat Kabupaten Klaten	3.168.122.447	0,32%
22	Kantor Ketahanan Pangan	483.848.672	0,05%
23	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3.521.308.864	0,36%
24	Kantor Arsip dan Perpustakaan	1.506.061.085	0,15%
25	Belanja untuk 26 Kecamatan	34.803.155.435	3,55%
26	Belanja untuk Kelurahan	913.011.670	0,09%
	Total Belanja	981.121.677.296	100,00%
	Surplus	3.412.759.708	
	Pembiayaan		
	Penerimaan Daerah		
1	Penggunaan SILPA	37.726.069.503	
2	Pencairan Dana Cadangan	1.000.000.000	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	17.464.964.500	
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	147.560.000	
5	Penerimaan Piutang Daerah	1.255.751.857	
	Pengeluaran Daerah		
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	
3	Pembayaran Pokok Utang	497.479.000	
	Pembiayaan Netto	57.096.866.860	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA)	60.509.626.568	

**PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DI LINGKUNGAN DITJEN MANDIKDASMEN
DANA DEKONSENTRASI T.A. 2009**

LOKASI: JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	DANA
030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH			2,438,410,048
10.01.01	PAUD			581,582
2304	Perluasan dan Peningkatan Mutu TK			581,582
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	39,942
0103	2 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival	35	KAB	239,140
0597	3 Pemberian Bantuan Sosial			
	Bantuan Alat Olahraga TK	11	TK	302,500
10.02.01	Wajar Dikdas 9 Tahun			2,200,575,155
0079	Pembangunan Gedung			43,225,000
6697	1 Pembangunan Perpustakaan dan PSB SD	455	UNIT	43,225,000
0108	Pengadaan Peralatan Laboratorium			5,513,143
0597	1 Pengadaan Alat IPA	83	PKT	5,395,000
3499	2 Supervisi dan Evaluasi	35	KAB	118,143
2321	Desentralisasi Peningkatan Pendidikan Dasar (ADB)			698,568
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	150,600
0012	2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	2	KEG	156,966
0051	3 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	1	KEG	104,644
0728	4 Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi	2	KEG	209,288
3499	5 Supervisi dan Evaluasi	1	KEG	77,070
2323	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			2,025,133,960
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	201,760
0149	2 Pengembangan Kelembagaan		KAB	
	Pelaksanaan Workshop	1	KEG	196,092
0546	3 Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan	1	KEG	256,420
0597	4 Pemberian Bantuan Sosial			
	BOS SMP/SMPLB Kota	141,193	SISWA	81,185,975
	BOS SMP/SMPLB Kabupaten	1,105,835	SISWA	630,325,950
	BOS SD/SDLB Kota	290,215	SISWA	116,086,000
	BOS SD/SDLB Kabupaten	2,998,243	SISWA	1,190,302,471
0728	5 Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi	2	KEG	6,319,292
0967	6 Monitoring dan Evaluasi	1	KEG	260,000
2325	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP			22,132,538
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	282,830
0051	2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program			
	Rakor dan Konsolidasi	2	KEG	576,756
0103	3 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival			
	Lomba MIPA	4	MP	429,490
	Pekan Olahraga	12	CAB	2,417,840
	Lomba Motivasi Belajar Mandiri	1	KEG	186,450
	Pekan Seni	1	KEG	1,076,800
	Kegiatan Penunjang	3	KEG	1,192,108
0149	4 Pengembangan Kelembagaan			
	Pelaksanaan Workshop	5	KEG	1,112,474
0597	5 Pemberian Bantuan Sosial			
	Pembimbingan Pelaksanaan KTSP	280	SEK	1,400,000
	Beasiswa SMP Terbuka	35,645	SISWA	10,693,500
	Beasiswa Bakat Prestasi	4,429	SISWA	2,657,400
3499	6 Supervisi dan Evaluasi			
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	35	KAB	106,890
2331	Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar			19,090,377
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	92,988
0065	2 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	3	KAB	1,820,000
0088	3 Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi	-	KEG	-
0103	4 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival			
	Olimpiade Sains SD	1	KEG	180,300
	Festival & Olimpiade Olahraga SD	1	KEG	978,400
0149	5 Pengembangan Kelembagaan			
	Seleksi dan Fasilitas PBS	-	KEG	-
0597	6 Pemberian Bantuan Sosial			
	Sarana Pengembangan Hasil Olimpiade MIPA	185	GGs	1,757,500
	Klub Olahraga SD	99	SD	792,000
	SDSN	110	SD	13,200,000
	Alat Matematika	-	UNIT	-
	Alat Bahasa Inggris	-	UNIT	-

**PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DI LINGKUNGAN DITJEN MANDIKDASMEN
DANA DEKONSENTRASI T.A. 2009**

LOKASI: JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	DANA
	Alat Bahasa Indonesia	-	UNIT	-
	Peningkatan Mutu Pembelajaran IPA	-	UNIT	-
	Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika	-	UNIT	-
	Buku Pengayaan	-	SD	-
	Pembinaan Pembelajaran Muatan Lokal	-	SD	-
0967	7 Monitoring dan Evaluasi			
	Verifikasi Subsidi	1	KEG	135,189
	Monitoring dan Evaluasi Subsidi	1	KEG	134,000
2336	Perluasan dan Peningkatan Mutu PK dan PLK (Tingkat Dasar)			12,267,015
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	153,820
0079	2 Bantuan Beasiswa			
	Subsidi beasiswa (Cacat, Inklusi, CI, BI, PLK)	14,044	SISWA	8,426,400
0088	3 Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi			
	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program	1	KEG	126,580
0487	4 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1	KEG	161,150
0597	5 Pemberian Subsidi			
	Persiapan	1	KEG	99,600
	Subsidi penyediaan alat	1	PKT	30,000
	Subsidi buku PK dan PLK	6,897	EKS	206,910
	Subsidi festival PK dan PLK Tk. Prop	1	KEG	300,000
	Subsidi penyediaan meubelair	4	PKT	106,000
	Subsidi penyediaan meubelair USB	-	PKT	-
	Subsidi operasional	12	PKT	240,000
	Subsidi pendukung pembelajaran SLB/Inklusi	2	PKT	23,000
	Subsidi pengembangan KTSP	2	PKT	489,460
	Subsidi penyempurnaan infrastruktur	2	PKT	100,000
	Subsidi Pokja Inklusif dan PLK	2	PKT	60,000
	Subsidi Rehab SLB	5	PKT	300,000
	Subsidi RKB	2	PKT	150,000
	Subsidi USB	1	PKT	1,000,000
	Subsidi Validasi Data	10	PKT	150,000
0728	6 Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi			
	Workshop Pengembangan PK dan PLK	1	KEG	144,095
2582	Pembangunan SD-SMP Satu Atap			9,992,154
0149	1 Pengembangan Kelembagaan			
	Workshop SD-SMP Satu Atap	1	KEG	249,569
	Verifikasi SD-SMP Satu Atap	1	KEG	80,640
0597	2 Pemberian Bantuan Sosial			
	Pembangunan SD-SMP Satu Atap	24	UNIT	9,600,000
3499	3 Supervisi dan Evaluasi			
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1	KEG	61,945
2589	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP			58,622,400
0597	1 Pemberian Bantuan Sosial			
	Pemberian Beasiswa Miskin tingkat SMP	110,400	SISWA	58,622,400
2590	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar			3,900,000
0597	1 Pemberian Bantuan Sosial			
	Subsidi TIK	65	PKT	3,900,000
10.03.01	Pendidikan Menengah			235,344,615
2356	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA			33,436,585
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	108,076
0051	2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program			
	Seleksi dan verifikasi, Review Proposal	2	KEG	1,840,268
0103	3 Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival			
	Olimpiade Sains (OS) SMA	1	KEG	879,945
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	1	KEG	1,533,346
0597	5 Pemberian Bantuan Sosial			
	Bantuan Imbal Swadaya Asrama	-	PKT	-
	Bantuan Imbal Swadaya Peralatan PSB (TIK)	109	PKT	10,900,000
	Bantuan Imbal Swadaya Ruang PSB (TIK)	20	PKT	1,600,000
	Blockgrant Sekolah Standar Nasional	319	PKT	15,950,000
0967	6 Monitoring dan Evaluasi			
	Penyusunan Instrumen ME Blockgrant dan BKMM SMA	1	KEG	11,075
	Monitoring dan Evaluasi Blockgrant dan BKMM SMA	1	KEG	571,650
	Analisis dan Tindak Lanjut ME dan Entri Data Peruntukan Blockgrant SMA	1	KEG	42,225
2358	Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK			11,460,680

**PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DI LINGKUNGAN DITJEN MANDIKDASMEN
DANA DEKONSENTRASI T.A. 2009**

LOKASI: JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	SATUAN	DANA
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	88,950
0050	2 Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik	1	KEG	383,970
0065	3 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	1	KEG	1,351,860
0149	4 Pengembangan Kelembagaan			
	Pelaksanaan LKS tk. Propinsi	1	KEG	1,398,700
	Pelaksanaan LKS tk. Nasional	1	KEG	101,500
	Koordinasi/Sosialisasi KTSP	1	KEG	1,891,650
0597	5 Pemberian Bantuan Sosial			
	Bantuan Lomba-lomba	1	PKT	70,000
	Bantuan Sertifikasi Uji Kompetensi Siswa SMK	121,192	SISWA	6,059,600
0657	6 Pemantauan dan Evaluasi			
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1	KEG	114,450
2585	Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah			67,861,140
0079	1 Bantuan Beasiswa			
	ATK Persiapan	2	KEG	30,000
	Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA	28,779	SISWA	22,447,620
	Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) SMK	58,184	SISWA	45,383,520
2586	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah			1,750,000
0165	1 Pembangunan Gedung Pendidikan			
	Bantuan Imbal Swadaya Rehabilitasi Gedung SMA	35	PKT	1,750,000
2594	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA			24,652,710
	1 Pemberian Bantuan Sosial			
	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	273,919	SISWA	24,652,710
2595	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK			72,013,500
0149	1 Pengembangan Kelembagaan			
	Pelaksanaan Workshop	1	KEG	1,351,860
0597	2 Pemberian Bantuan Sosial			
	Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	588,847	SISWA	70,661,640
3400	Pembangunan Gedung Pendidikan			24,170,000
	1 Pembangunan Perpustakaan SMA	19	PKT	2,660,000
	2 Pembangunan Lab. IPA SMA	124	PKT	17,360,000
	3 Pembangunan Lab. Komputer SMA	14	PKT	1,540,000
	4 Pembangunan USB SMA	-	PKT	-
	5 Pembangunan RKB SMA	29	PKT	2,610,000
10.07.03	Manajemen Pelayanan Pendidikan			1,908,696
2563	Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen			1,908,696
0002	1 Administrasi Kegiatan	12	BLN	97,500
0051	2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	3	KEG	96,788
0149	3 Pengembangan Kelembagaan			
	RPDK	5	KEG	1,241,184
0487	4 Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan			
	Konsolidasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dikdasmen	1	KEG	195,096
	Konsolidasi Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Berbasis SAI	1	KEG	213,096
	Konsolidasi Inventarisasi Aset/Barang Bidang Dikdasmen	1	KEG	65,032

THNANG	KDBAES1	KDSATKE	NMSATKER	KDDEKON	KDKPPN	KDWILAY/KDMAKM/ RUPIAH		
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522115	2.400.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	522114	30.750.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522123	209.481.250
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	536111	32.585.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511111	804.835.900
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	512211	15.897.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511122	16.863.694
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511125	19.702.900
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	522115	116.400.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522119	19.825.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521115	31.825.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522115	116.370.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511151	73.495.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522111	62.721.500
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	536111	44.890.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521119	75.639.500
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521111	30.938.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	523111	42.700.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511129	151.980.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522114	13.000.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	523121	32.105.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511151	115.520.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	532111	150.193.950
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	524119	674.100.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	523111	69.520.825
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	524119	91.030.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521211	19.296.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511125	15.842.090
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511129	83.220.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	521115	27.600.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511111	1.195.351.900
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521213	33.625.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511123	25.560.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511221	58.281.710
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	532111	117.865.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521111	81.067.680
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511123	6.370.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511126	52.282.800
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	533113	1.485.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	533111	135.980.500
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	521219	17.750.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511119	38.077
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	524119	267.396.600
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	522111	55.633.076
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521211	19.823.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511122	10.296.384
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	512211	16.973.000
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521213	40.450.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	521219	266.362.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	524111	155.648.300
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511126	46.614.600
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	523121	38.410.000
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	511119	20.490
2009	02301	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521114	1.989.000
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	511121	63.719.700
2009	02301	208798	BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA	KD	026	0351	522111	55.355.708
2009	02301	621686	BALAI BAHASA SEMARANG	KD	026	0351	521211	141.712.087
2009	02302	414710	INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKBUD	KP	088	0300	521211	7.664.700
2009	02302	414710	INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKBUD	KP	088	0300	521119	5.499.225
2009	02302	414710	INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKBUD	KP	088	0300	522114	11.454.000
2009	02302	414710	INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKBUD	KP	088	0300	521213	20.900.000
2009	02302	414710	INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKBUD	KP	088	0300	524111	1.576.866.800
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521211	2.163.438.325
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522113	317.869.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522114	678.940.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522115	1.027.090.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521212	115.910.680.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521111	2.130.201.291.750
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	524119	24.834.264.250
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522119	386.157.250
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521213	415.000.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521113	148.062.840.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	524111	251.840.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521115	327.040.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521219	852.970.000
2009	02303	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521114	71.091.200
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521219	16.997.874.409
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	532111	5.550.887.566
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511131	2.200
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511129	6.318.539.535
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521113	23.994.200
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	533111	11.947.531.342
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511123	1.008.380.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	534131	585.586.750
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521211	10.350.322.843
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	522115	50.000.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511147	77.824.800
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511122	1.163.908.051
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511119	1.282.657
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	522113	25.000.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	523121	1.600.545.527
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511151	2.085.414.400
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511125	1.507.893.779
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511153	3.300.255.400
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	524119	221.276.810
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511111	49.474.703.720
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	522114	15.750.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521119	557.315.860
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	512311	1.157.327.700
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521111	2.503.721.691
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521114	81.624.640
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521113	13.891.362.400

THNANG	KDBAES1	KDSATKE	NMSATKER	KDEKON	KDKPPN	KDWILAY/	KDMAKM/	RUPIAH
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	512211	321.794.500
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	536111	1.137.484.250
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521115	486.818.500
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511154	1.132.586.600
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	523133	39.975.925
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	524111	1.491.351.300
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	512111	230.825.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511126	2.790.331.720
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511124	9.262.485.000
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	522111	2.837.176.028
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	523199	1.577.656.900
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	511121	3.807.591.204
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	523111	1.396.909.377
2009	02304	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	KD	029	0315	521213	21.029.816.722
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511121	5.767.701.452
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	522111	3.217.791.116
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	522113	97.171.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521111	355.670.590
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	534131	147.156.500
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523119	145.871.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511119	397.430
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511124	7.837.445.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	537115	880.484.150
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511151	485.420.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	524119	77.262.700
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	524111	631.543.798
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	536111	879.450.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	140	0351	522113	1.792.134.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	523111	1.830.951.900
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521119	3.917.134.425
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	533111	13.369.275.397
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521211	98.288.500
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	524111	1.057.148.926
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511153	7.716.204.400
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	522115	292.232.200
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511124	9.570.742.600
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	522119	45.000.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511111	28.622.964.790
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511125	1.052.539.249
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511126	1.283.382.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	525119	369.212.289
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	522115	1.000.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	537114	413.190.500
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521115	160.585.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	537112	17.081.148.200
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511121	3.247.249.670
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511125	2.409.988.074
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521219	1.211.165.756
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	524111	532.935.075
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	525112	74.518.262.995
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511124	3.584.728.700
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	536111	1.101.546.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511119	1.895.587
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521219	2.762.647.924
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511153	529.356.500
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523133	197.506.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511122	1.668.191.663
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521213	3.602.528.515
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521219	11.790.474.735
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521211	256.435.245
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523129	394.136.900
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511126	3.990.177.300
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521115	16.910.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521211	926.033.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511111	15.648.302.380
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	512211	22.193.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521114	23.797.300
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511111	74.515.300.842
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511122	577.924.417
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511121	2.116.484.044
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511122	889.284.751
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523121	1.196.442.500
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521213	222.630.150
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	537113	643.925.500
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511123	918.825.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	522111	4.236.948.645
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	522111	478.810.243
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	572113	2.054.819.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	525114	6.184.778.376
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521213	1.240.302.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511126	2.128.009.020
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	524119	100.938.900
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	525115	4.214.324.688
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511154	2.098.181.400
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	572113	11.159.031.500
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	537113	41.730.075.610
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	536111	694.258.850
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521119	18.180.644.856
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	512311	557.421.250
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521213	215.851.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521115	1.708.588.642
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	533111	9.446.366.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523121	1.795.013.104
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511147	28.653.300
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511129	4.504.980.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525112	8.088.192.922
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525119	58.441.420.091

THNANG	KDBAES1	KDSATKE	NMSATKER	KDDEKON	KDKPPN	KDWILAY/KDMAKM/ RUPIAH		
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511123	1,144.210.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	572113	23.298.495.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521119	8.125.088.142
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	572111	7.343.118.600
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	533111	2.215.173.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	537115	496.477.960
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	532111	10.210.556.083
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523119	773.261.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525115	4.888.883.407
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	537114	462.419.250
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	537112	12.718.813.473
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521115	101.421.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	533121	313.250.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511147	80.377.800
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511121	1.266.377.736
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511151	191.805.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	532111	518.780.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	140	0351	533111	141.214.030.800
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	523111	399.062.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	525111	887.905.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	512111	30.260.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525111	67.183.610.790
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523111	836.437.300
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	522111	916.145.326
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511147	74.783.700
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521211	993.612.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511125	1.450.048.558
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511122	421.519.448
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	523111	4.387.971.180
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	512311	212.325.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521111	599.206.650
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511154	1.004.043.600
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511111	42.272.775.254
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	533111	1.421.524.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511129	1.763.400.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511153	7.224.816.800
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511151	1.211.215.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511119	875.285
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	522114	244.000.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	524111	571.958.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	523121	284.893.575
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511123	60.840.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	522115	1.000.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511153	3.455.939.800
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511147	114.379.800
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	521119	1.705.562.875
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	524119	1.023.117.300
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	522115	904.175.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511123	512.320.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511154	5.763.727.200
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	512211	72.217.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521111	489.037.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	512211	54.889.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511129	2.608.095.000
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	512311	944.464.950
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	537111	680.087.500
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511129	1.491.255.000
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511124	15.871.086.200
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525113	4.915.268.973
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521219	1.782.534.800
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	572113	33.508.530.784
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	532111	3.701.452.800
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	511119	602.752
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	521114	52.474.000
2009	02304	189904	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI	KD	026	0351	523121	501.157.550
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	521111	757.633.135
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	511151	2.454.540.000
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511126	914.441.400
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	511125	476.619.572
2009	02304	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	KD	026	0351	525114	7.699.666.196
2009	02304	576782	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	532111	14.595.454.500
2009	02304	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	KD	026	0351	512211	206.074.500
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	512211	79.380.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511147	53.992.500
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	523121	749.734.600
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511151	604.410.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521213	269.878.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521115	11.793.274.185
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521119	12.542.644.577
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	525115	2.037.430.856
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511129	1.688.295.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511154	4.971.646.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	512111	25.056.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	524119	132.800.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	537113	23.399.954.375
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	523199	250.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521111	477.076.425
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	522114	2.300.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511147	101.496.732
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521211	263.777.500
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	537112	13.886.416.423
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521114	58.154.660
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	572113	2.553.092.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	512111	151.332.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	533111	8.599.560.500
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	512311	217.834.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511111	72.373.024.586
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	523111	1.912.520.600
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	524111	832.550.700
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511154	597.766.400
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521219	7.193.447.150
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	533111	5.962.696.500

THNANG	KDBAES1	KDSATKE	NMSATKER	KDDEKON	KDKPPN	KDWILAY/	KDMAKM/	RUPIAH
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	536111	296.114.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	524111	678.736.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511119	357.133
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	522112	19.810.900
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521219	14.107.565.350
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521115	813.685.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511119	1.760.347
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	525119	53.192.953.357
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511123	1.075.465.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	536111	624.966.550
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	522115	70.800.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	527113	16.215.042.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	532111	12.488.725.240
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511129	7.155.315.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	522115	47.500.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511126	3.827.707.900
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	523119	70.000.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	522111	2.013.927.196
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511124	15.696.497.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	524219	643.613.100
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	532111	2.041.927.300
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	524119	242.520.875
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	525114	3.406.454.970
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	525111	28.455.394.792
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511121	1.115.846.386
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	522113	5.000.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511126	768.168.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511122	1.593.746.793
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511125	2.394.304.155
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511123	272.375.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	521111	2.628.555.250
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	523111	3.060.903.800
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521213	587.600.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521119	722.189.000
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	523121	1.190.630.181
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511122	313.309.209
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511111	13.773.696.440
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	521211	869.880.250
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511151	2.230.820.000
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511125	430.815.724
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511121	5.751.930.517
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	522111	448.277.560
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	511153	6.010.093.400
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511153	621.019.900
2009	02304	189882	UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA	KD	028	0356	512211	409.310.500
2009	02304	189925	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA	KD	028	0356	511124	2.461.555.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521211		754.515.500
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511123		83.569.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	532111		819.769.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	524219		148.000.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521115		69.600.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521114		31.175.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	524111		590.836.856
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511151		208.985.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511121		218.441.876
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521219		1.414.348.750
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	524119		2.968.135.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	523121		291.691.150
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511125		61.464.443
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	512211		13.613.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	533111		992.493.500
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521213		977.045.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	527111		50.940.713.163
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	522119		40.000.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	523111		505.209.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521119		341.459.500
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511124		132.849.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	522111		344.480.072
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	521111		181.300.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	522114		60.060.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511126		170.638.200
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511129		287.355.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511122		63.058.646
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	522115		197.300.000
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511111		2.967.128.200
2009	02305	538218	BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA SEKD	026	0301	511119		84.486
2009	02305	031306	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG (05)	TP	097	0313	521211	32.940.000
2009	02305	031306	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG (05)	TP	097	0313	521213	33.900.000
2009	02305	031306	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG (05)	TP	097	0313	524119	42.439.000
2009	02305	031306	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG (05)	TP	097	0313	527111	3.708.000.000
2009	02305	031605	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILACAP (05)	TP	130	0316	521115	21.000.000
2009	02305	031605	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILACAP (05)	TP	130	0316	527111	3.708.000.000
2009	02305	031605	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILACAP (05)	TP	130	0316	524119	44.160.000
2009	02305	031605	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILACAP (05)	TP	130	0316	521213	14.550.000
2009	02305	031605	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILACAP (05)	TP	130	0316	521211	32.940.000
2009	02305	031807	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA (05)	TP	164	0318	524119	44.160.000
2009	02305	031807	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA (05)	TP	164	0318	521211	32.940.000
2009	02305	031807	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA (05)	TP	164	0318	521213	42.900.000
2009	02305	031807	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA (05)	TP	164	0318	527111	3.744.000.000
2009	02305	032908	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI (05)	TP	028	0329	527111	3.708.000.000
2009	02305	032908	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI (05)	TP	028	0329	521213	42.900.000
2009	02305	032908	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI (05)	TP	028	0329	521211	32.940.000
2009	02305	032908	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI (05)	TP	028	0329	524119	44.160.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521211	1.162.078.105
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521114	4.320.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522119	1.129.555.680
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521213	853.330.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521219	1.338.886.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521115	64.776.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522115	454.896.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	524119	2.600.486.000
2009	02305	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	527111	87.538.830.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	523111	202.800.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	524119	1.504.415.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511121	252.066.828
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521119	1.912.200.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521115	122.400.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	532111	25.850.000

THNANG	KDBAES1	KDSATKE	NMSATKER	KDEKON	KDKPPN	KDWILAY/KDMAKM/ RUPIAH		
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522115	14.250.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	522119	4.000.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	532121	50.963.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511111	3.414.084.860
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511125	79.284.381
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	522111	917.809.903
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521211	417.862.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521115	63.000.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521219	96.047.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521111	1.529.773.429.300
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521119	4.000.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521211	7.243.547.760
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	533115	78.500.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511124	202.325.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	524119	15.609.564.700
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	523121	96.287.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521112	350.000.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	524111	91.187.100
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511126	190.392.300
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	532111	7.483.482.200
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	522115	580.510.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511119	82.089
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511123	78.690.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521213	1.412.745.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511122	74.187.444
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	533121	814.306.000
2009	02308	030059	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP JAWA TENGAH (08)	DK	026	0351	521213	994.675.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511151	260.025.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	511129	462.990.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521113	60.181.500.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	512211	48.000.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	533111	2.757.211.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	533113	75.000.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	522119	676.468.025
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521111	73.544.065.000
2009	02308	414820	LPMP JAWA TENGAH	KD	026	0351	521111	493.000.000



Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

No	Keterangan	Jumlah	Diperhitungkan sebagai	Keterangan
			Belanja	
	Sumber Dana dari APBN			
1	Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri	40.618.459.500	Ya	
2	Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri	23.376.555.000	Ya	
	sub total			
	Sumber Dana APBD II			
	Sub Unit : Dinas Pendidikan			
1	Gaji Pegawai	75.030.439.448	Tidak	tidak dapat dipisahkan untuk SD/SMP/SMA/SMK
2	Administrasi Perkantoran	628.001.668	Tidak	tidak dapat dipisahkan untuk SD/SMP/SMA/SMK
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.148.950	Tidak	tidak dapat dipisahkan untuk SD/SMP/SMA/SMK
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	60.000.000	Tidak	tidak dapat dipisahkan untuk SD/SMP/SMA/SMK
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar			
5	Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Pendidikan Dasar	150.792.000	Tidak	tidak dapat dipisahkan SD/SMP
6	Pengembangan Kantin Kejuruan Pendidikan Dasar	7.500.000	Tidak	tidak dapat dipisahkan SD/SMP
7	Pendampingan Pengembangan Kantin Kejuruan Pendidikan Dasar	750.000	Tidak	tidak dapat dipisahkan SD/SMP
8	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI	360.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
9	Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI	35.450.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
10	Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI	160.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
11	Pendampingan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI	14.675.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
12	Pendampingan Rehabilitasi Sedang/Berat SD/MI	112.600.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
13	Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SD/MI	236.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
14	Pendampingan Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SD/MI	22.175.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
15	Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD/MI	140.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
16	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI	200.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
17	Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI	19.466.300	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
18	Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	70.000.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
19	Pendampingan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	3.500.000	Ya	kemungkinan kecil MI menerima
20	Pembinaan Minat dan Bakat Siswa SD dan SMP	168.600.000	Tidak	tidak dapat dipisahkan SD/SMP
21	Perintisan SBI/SSN SD	48.416.000	Ya	hanya untuk SD Negeri
22	Fasilitasi UAS SD/MI	336.690.400	Tidak	semua SD negeri/swasta/MI/MI swasta menerima
23	Operasional Tim BOS Kabupaten	77.999.800	Tidak	semua SD/SMP/MI/MTs negeri dan swasta menerima
24	Fasilitasi SMP SBI	240.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
25	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs	500.000.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
26	Pendampingan Ruang Perpustakaan SMP/MTs	45.650.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
27	Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs	300.000.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
28	Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs	29.800.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
29	Pengadaan Multimedia SMP SBI	100.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
30	Pendampingan Pengadaan Multi Media SMP SBI	9.950.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
31	Pembuatan Lab Peraga PAKEM SMP SBI	20.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
32	Pendampingan Pembuatan Lab Peraga PAKEM SMP SBI	2.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
33	Pengadaan Alat Lab SMP SBI	100.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
34	Pendampingan Pengadaan Alat Lab SMP SBI	9.950.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
35	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs	150.000.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
36	Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs	13.600.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
37	Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP/MTs	225.000.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
38	Pendampingan Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP/MTs	21.075.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
39	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP SBI	50.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
40	Pengadaan Buku Pelajaran SMP SBI	100.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
41	Pengembangan SMP SBI	150.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
42	Pendampingan Pengembangan SMP SBI	14.980.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
43	Pengembangan Imersi SMP	50.000.000	Ya	hanya untuk SMP Negeri
44	Pengembangan Redip SMP/MTs	90.000.000	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
45	Pendampingan Pengembangan Redip SMP/MTs	8.999.900	Ya	kemungkinan kecil MTs menerima
46	Fasilitasi UAS SMP/MTs	306.026.800	Tidak	SMP/MTs negeri dan swasta menerima
	Program Pendidikan Menengah			
47	Lomba Mapel dan Karya Ilmiah Remaja SMA	110.000.000	Tidak	SMA Negeri dan Swasta menerima
48	Pengembangan Kantin Kejuruan Pendidikan Menengah	7.500.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
49	Pendampingan Pengembangan Kantin Kejuruan	750.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
50	Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Siswa	30.000.000	Tidak	SMA/SMK Negeri dan Swasta menerima
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK	392.900.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
52	Pengadaan Alat Praktek IPA SMA SBI	50.000.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
53	Pendampingan Pengadaan Alat Praktek IPA SMA SBI	4.900.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
54	Pengadaan Multi Media SMA SBI	100.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
55	Pendampingan Pengadaan Multi Media SMA SBI	9.900.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
56	Pengadaan Multi Media SMK SBI	200.000.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
57	Pendampingan Pengadaan Multi Media SMK SBI	19.949.915	Ya	hanya untuk SMK Negeri
58	Pengadaan Alat Praktek IPA SMK SBI	100.000.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
59	Pendampingan Pengadaan Alat Praktek IPA SMK SBI	9.950.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
60	Pembangunan RKB SMA/SMK	360.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
61	Pendampingan Pembangunan RKB SMA/SMK	34.420.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
62	Pembangunan RKB SMA Moving Class	75.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
63	Teaching Factory	300.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
64	Pendampingan Teaching Factory	29.500.000	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
65	Rehabilitasi Gedung SMA	120.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
66	Pendampingan Rehabilitasi Gedung SMA	11.987.500	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
67	Pengadaan Ruang Lab IPA SMA SBI	140.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
68	Pengadaan Ruang Lab IPA SMK SBI	280.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
69	Pendampingan Pengadaan Ruang Lab IPA SMK SBI	27.500.000	Ya	hanya untuk untuk SMK Negeri
70	Pengadaan Alat Lab Komputer SMA/SMK	130.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
71	Pendampingan Pengadaan Alat Lab Komputer SMA/SMK	12.500.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
72	Promosi Kompetensi Siswa SMK	97.990.000	Tidak	SMK Negeri/Swasta menerima
73	Operasional Beasiswa Anak Kurang Mampu	17.000.000	Tidak	SMA/SMK Negeri dan Swasta menerima
73	Pengadaan Buku Pelajaran SMA SBI	50.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
74	Pendampingan Pengadaan Buku Pelajaran SMA SBI	4.995.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
75	Pengadaan Buku Pelajaran SMK SBI	150.000.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri

No	Keterangan	Jumlah	Diperhitungkan sebagai	Keterangan
76	Pendampingan Pengadaan Buku Pelajaran SMK SBI	14.700.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
77	Prakerin SMA	20.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
78	Pendampingan Prakerin SMK	2.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
79	Pengadaan Alat Bengkel SMK	150.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
80	Pendampingan Pengadaan Alat Bengkel SMK	14.900.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
81	Fasilitas ICT Base SMA dan SMK	100.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
82	Pendampingan Fasilitas ICT Base SMA dan SMK	9.900.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
83	Pengembangan Career Centre	200.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
84	Pendampingan Career Centre	19.980.000	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
85	Fasilitas Kelas Imersi SMA	100.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
86	Pendampingan Fasilitas Kelas Imersi SMA	9.750.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
87	Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran SMA/SMK	175.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
88	Pendampingan Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran SMA/SMK	17.150.000	Ya	kemungkinan kecil SMA/SMK Swasta menerima
89	Pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK Negeri	535.122.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
90	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA	120.000.000	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
91	Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA	11.173.900	Ya	kemungkinan kecil SMA Swasta menerima
92	Penyelenggaraan KBM SMK Negeri Bayat	56.919.000	Ya	untuk SMK Negeri
93	Penyelenggaraan KBM SMK Negeri Gantiwarno	47.526.000	Ya	untuk SMK Negeri
94	Fasilitas SMA SBI	200.000.000	ya	hanya untuk SMA Negeri
95	Pendampingan Fasilitas SMA SBI	19.949.915	ya	hanya untuk SMA Negeri
96	Pengembangan SMK SBI	450.000.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
97	Pendampingan Pengembangan SMK SBI	44.480.000	Ya	hanya untuk SMK Negeri
98	Pembangunan Laboratorium USB SMK	615.601.500	Ya	kemungkinan kecil SMK Swasta menerima
99	Fasilitas UAS SMA/MA	135.361.900	Tidak	SMA/MA Negeri dan Swasta menerima
100	Fasilitas UAS SMK	214.358.900	Tidak	SMK Negeri/Swasta menerima
	Pendidikan Non Formal			
101	Belanja	178.690.000	Tidak	bukan untuk pendidikan formal
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik			
102	Sertifikasi pendidik	39.088.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan guru SD/SMP/SMA/SMK
103	Pelatihan pendidik	10.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan guru SD/SMP/SMA/SMK
104	Penilaian Angka Kredit	25.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan guru SD/SMP/SMA/SMK
105	Seleksi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas	25.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan guru SD/SMP/SMA/SMK
106	Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMP SBI	50.000.000	ya	hanya untuk SMP Negeri
107	Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA SBI	50.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
108	Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK SBI	150.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
	Pengembangan Budaya Baca			
109	Pengadaan buku perpustakaan	97.300.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
	Manajemen Pelayanan Pendidikan			
110	Rehab Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan	47.500.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
111	Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan	143.415.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
112	Piloting PUG Bidang Pendidikan	149.998.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
113	Pendampingan Piloting PUG Bidang Pendidikan	15.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
114	Pengumpulan Data Base Pendidikan	120.500.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
115	Pendampingan Pengumpulan Data Base Pendidikan	12.049.900	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
116	Manajemen Pendataan Pendidikan	24.300.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
117	Pendampingan Manajemen Pendataan Pendidikan	2.500.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
118	Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan	129.550.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
119	Pendampingan Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan	10.029.900	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
120	Pelatihan Guru Mapel yang di-UN-kan	241.988.700	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
121	Pendampingan Pelatihan Guru Mapel yang di-UN-kan	31.497.500	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
122	Penyusunan Profil Pendidikan	50.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
123	Operasional Cabang Dinas Pendidikan	312.000.000	Tidak	tidak bisa dipisahkan SD/SMP/SMA/SMK
124	Fasilitas SNBI SMA	180.000.000	Ya	hanya untuk SMA Negeri
	Sub Unit : TK Negeri			
1	Gaji Pegawai	176.102.049	Tidak	
2	Belanja langsung	4.324.000	Tidak	
	Sub Unit : SD Negeri			
1	Gaji Pegawai	275.460.403.910	Ya	
	Sub Unit : SMP Negeri			
1	Gaji Pegawai	102.863.097.616	Ya	
2	Pendampingan Operasional Sekolah SMP Negeri	3.192.579.980	Ya	
	Sub Unit : SMA Negeri			
1	Gaji Pegawai	36.037.799.275	Ya	
2	Administrasi Perkantoran	732.121.497	Ya	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.499.350	Ya	
	Sub Unit : SMK Negeri			
1	Gaji Pegawai	19.271.286.869	Ya	
2	Administrasi Perkantoran	472.405.975	Ya	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.495.500	Ya	
	Sub Unit : SKB			
1	Gaji Pegawai	722.612.366	Tidak	
2	Belanja langsung	183.961.114	Tidak	
	Total Belanja	592.162.966.797		
	Yang Diperhitungkan Belanja untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri	511.884.900.402		
	Prosentase Belanja Yang diperhitungkan dibandingkan Total Belanja	86,44%		